

ALIH STATUS JALAN DAERAH MENJADI JALAN NASIONAL/ SEBALIKNYA

**disampaikan pada
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Jalan
Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2019**

Malang, 20 Agustus 2019



**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT**



OUTLINE

1. Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan
2. Profil Provinsi Jawa Timur
3. Surat Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
4. Rekapitulasi Evaluasi Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5. Penutup

Lampiran:

- a. Analisis dan Evaluasi Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- b. Analisis Tambahan
- c. Jalan Nasional yang Baru *Upgrade* Tahun 2015



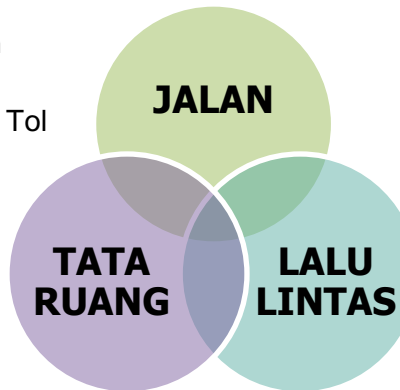
1. PEDOMAN PENETAPAN FUNGSI DAN STATUS JALAN



DASAR HUKUM

- ❖ UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- ❖ PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- ❖ PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

- ❖ UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- ❖ PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN



- ❖ KM No. 49 Tahun 2005 tentang SISTRANAS
- ❖ UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

UU No. 38
Tahun 2004
tentang **Jalan**
Pasal 8 ayat (6)
dan 9 ayat (7)

PP No. 34 Tahun
2006 tentang **Jalan**
Pasal 60, 61 ayat (1)
& (2) beserta
penjelasannya; serta
Pasal 62 ayat (1) &
(6) beserta
penjelasannya

**Penetapan Kepmen
dimaksud mengacu
pada:** Permen PU No.
03/PRT/M/2012
tentang **Pedoman
Penetapan Fungsi
Jalan dan Status
Jalan**

❖ **Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan** diatur dalam Peraturan Pemerintah

❖ **Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum** diatur dalam Peraturan Pemerintah

❖ **Sistem jaringan jalan primer ditetapkan dengan Kepmen** dengan memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi

❖ Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya untuk jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer **dilakukan secara berkala dengan Kepmen**

❖ Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan **dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Menteri**

❖ Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsi dan statusnya dilakukan sesuai dengan **tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai secara berkala** (PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN)

❖ **Penetapan & Prosedur Penetapan** Fungsi Jalan & Status Jalan

❖ **Wewenang Penetapan** Fungsi Jalan & Status Jalan

❖ **Perubahan** Fungsi Jalan & Status Jalan

PENGELompokkan JALAN

PERUNTUKAN	SISTEM	FUNGSI		STATUS			
JALAN UMUM (Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum)	SISTEM PRIMER (Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat pusat kegiatan)	Arteri (JAP)	SK Menteri PU	JALAN NASIONAL: JAP, JKP-1, JSN, Jalan Tol	SK Menteri PU		
		Kolektor-1 (JKP-1)					
		Kolektor-2(JKP-2)	SK Gubernur	JALAN PROVINSI: JKP-2, JKP-3, JSP, Ruas jalan di wilayah DKI Jakarta kecuali jalan nasional	SK Gubernur		
		Kolektor-3 (JKP-3)					
		Kolektor-4 (JKP-4)					
		Lokal (JLP)					
		Lingkungan (Jling-P)					
	SISTEM SEKUNDER (Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan)	Arteri (JAS)				JALAN KABUPATEN (JKP-4, JLP, Jling-P, JSK, JAS, JKS, JLS, Jling-S) dan JALAN DESA (JLing-P & JLP yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan)	SK Bupati
		Kolektor (JKS)					
		Lokal (JLS)					
		Lingkungan (Jling-S)					
JALAN KHUSUS (Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.)							

KETERANGAN :

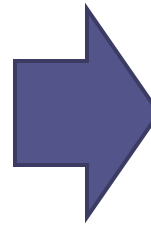
JAP : Jalan Arteri Primer
 JKP-1 : Jalan Kolektor Primer-1 (Antar Ibukota Propinsi)
 JKP-2 : Jalan Kolektor Primer-2 (Ibukota Propinsi dengan Ibukota Kabupaten)
 JKP-3 : Jalan Kolektor Primer-3 (Antar Ibukota Kabupaten)

JLP : Jalan Lokal Primer
 Jling-P : Jalan Lingkungan Primer
 JAS : Jalan Arteri Sekunder
 JKS : Jalan Kolektor Sekunder
 JLS : Jalan Lokal Sekunder
 JLing-S : Jalan Lingkungan Sekunder

PENGELOMPOKAN JALAN (MENURUT SISTEM JARINGAN JALAN)

❖ SISTEM PRIMER

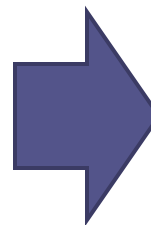
Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan **semua wilayah di tingkat nasional**, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat pusat kegiatan.



(Sistem Jaringan Jalan Primer adalah **sistem jaringan jalan bersifat menerus** yang memberikan pelayanan lalu lintas **tidak terputus** walaupun masuk ke dalam **kawasan perkotaan**)

❖ SISTEM SEKUNDER

Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat **di dalam kawasan perkotaan**.



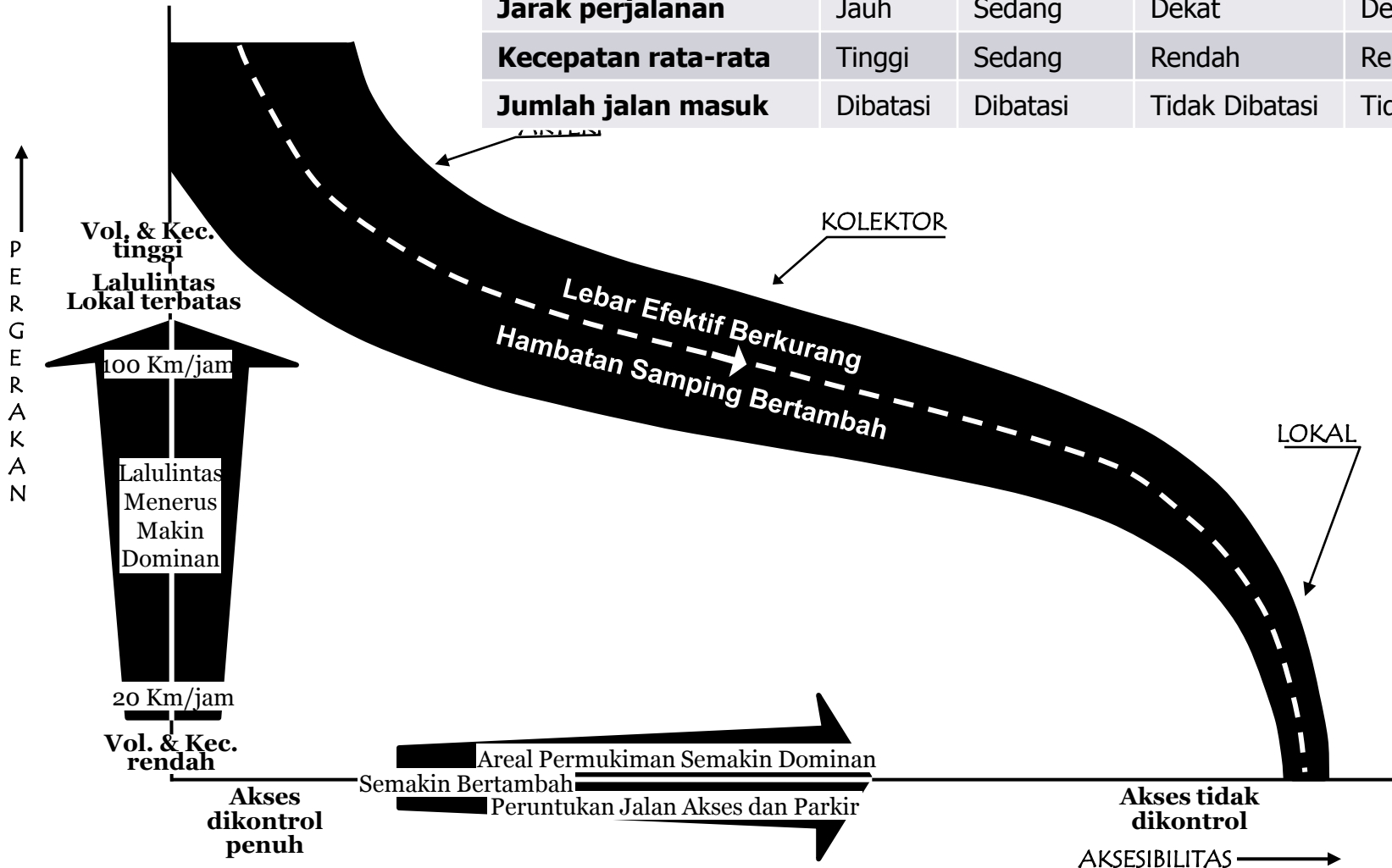
(Yang dimaksud dengan **kawasan perkotaan** adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat **permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi**)

KRITERIA JALAN MENURUT FUNGSI

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

HIERARKI JALAN

Kriteria	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan
Angkutan yang dilayani	Utama	Pengumpul	Setempat	Lingkungan
Jarak perjalanan	Jauh	Sedang	Dekat	Dekat
Kecepatan rata-rata	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah
Jumlah jalan masuk	Dibatasi	Dibatasi	Tidak Dibatasi	Tidak Dibatasi





KRITERIA JALAN MENURUT STATUS

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

- **JALAN NASIONAL**

Merupakan jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol

- **JALAN PROVINSI**

Merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi

- **JALAN KABUPATEN**

Merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten

- **JALAN KOTA**

Merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota

- **JALAN DESA**

Merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan

ARAHAN PENATAAN RUANG DALAM PENGATURAN FUNGSI JALAN PADA SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER

Perkotaan	PKN	PKW	PKL	PKLing	Persil	PKSN	Bandara Utama	Bandara Pengumpul	Bandara Pengumpan	Pelabuhan Utama	Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Pengumpan	KSN	KSP	KSK
PKN	JAP	JAP	JKP	JLP	Jling.P	JSN	JAP	JAP	---	JAP	JAP	---	JSN	---	---
PKW	JAP	JKP	JKP	JLP	Jling.P	JSN	JAP	JAP	JSP	JAP	JAP	JSP	JSN	JSP	---
PKL	JKP	JKP	JLP	JLP	Jling.P	JSN	---	---	JSK	---	---	JSK	---	---	JSK
PKLing	JLP	JLP	JLP	JLP	Jling.P	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Persil	Jling.P	Jling.P	Jling.P	Jling.P	Jling.P	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PKSN	JSN	JSN	JSN	---	---	JSN	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bandara Utama	JAP	JAP	---	<pre> graph TD A[Ibukota Provinsi] --- B[JKP-1] B --- C[Ibukota Kabupaten/ Kota] C --- D[JKP-2] D --- E[Ibukota Kecamatan] F[JKP-3] --- G[Ibukota Kabupaten/ Kota] H[JKP-4] --- I[Ibukota Kecamatan] </pre>											
Bandara Pengumpul	JAP	JAP	---												
Bandara Pengumpan	---	JSP	JSK												
Pelabuhan Utama	JAP	JAP	---												
Pelabuhan Pengumpul	JAP	JAP	---												
Pelabuhan Pengumpan	---	JSP	JSK												
KSN	JSN	JSN	---												
KSP	---	JSP	---												
KSK	---	---	JSK												

Keterangan :

PKN = Pusat Kawasan Nasional
 PKW = Pusat Kawasan Wilayah
 PKL = Pusat Kawasan Lokal
 PK-Ling = Pusat Kawasan Lingkungan
 PKSN = Pusat Kegiatan Strategis Nasional

JAP = Jalan Arteri Primer
 JKP = Jalan Kolektor Primer
 JLP = Jalan Lokal Primer
 Jling.P = Jalan Lingkungan Primer

JSN = Jalan Strategis Nasional
 JSP = Jalan Strategis Provinsi
 JSK = Jalan Strategis Kabupaten/Kota



FUNGSI JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER

- **JAP (Jalan Arteri Primer)**

- AntarPKN
- Antara PKN dan PKW
- Antara PKN dan/atau PKW dan Pelabuhan Utama/Pengumpul
- Antara PKN dan/atau PKW dan Bandar Udara Utama/Pengumpul

- **JKP (Jalan Kolektor Primer)**

- JKP-1 → Antaribukota provinsi
- JKP-2 → Antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota
- JKP-3 → Antaribukota kabupaten/kota
- JKP-4 → Antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan

- **JLP (Jalan Lokal Primer)**

- Antara PKN dan PK-Ling
- Antara PKW dan PK-Ling
- antarPKL
- Antara PKL dan PK-Ling

- **Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)**

- Antarpusat kegiatan dalam kawasan perdesaan
- Jalan dalam lingkungan kawasan perdesaan

JALAN NASIONAL

**JALAN DAERAH
(Prov/ Kab)**

ARAHAN PENATAAN RUANG DALAM PENGATURAN FUNGSI JALAN PADA SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER

Perkotaan	Primer	Sekunder I	Sekunder II	Sekunder III	Perumahan
Primer	---	JAS	---	---	---
Sekunder I	JAS	JAS	JAS	---	JLS
Sekunder II	---	JAS	JKS	JKS	JLS
Sekunder III	---	---	JKS	JLS	JLS
Perumahan	---	JLS	JLS	JLS	Jling.S

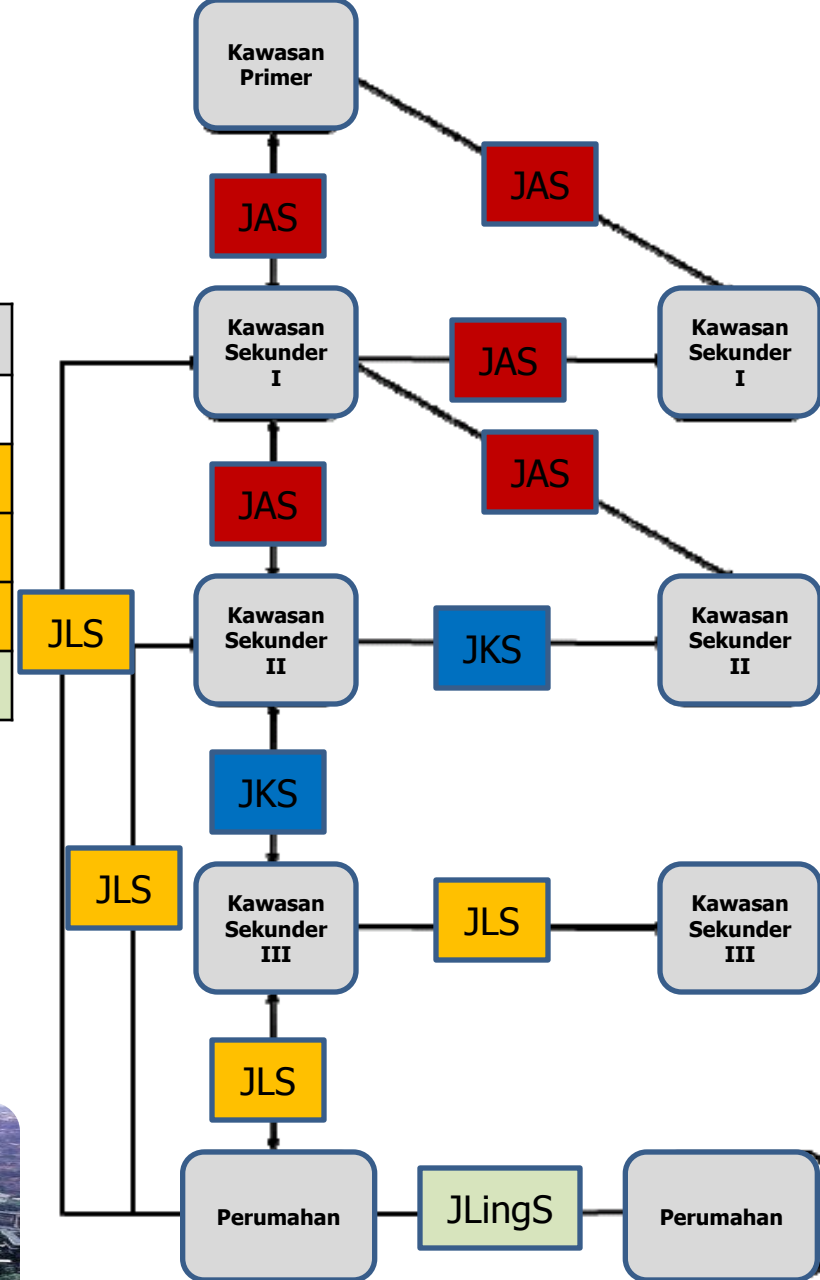
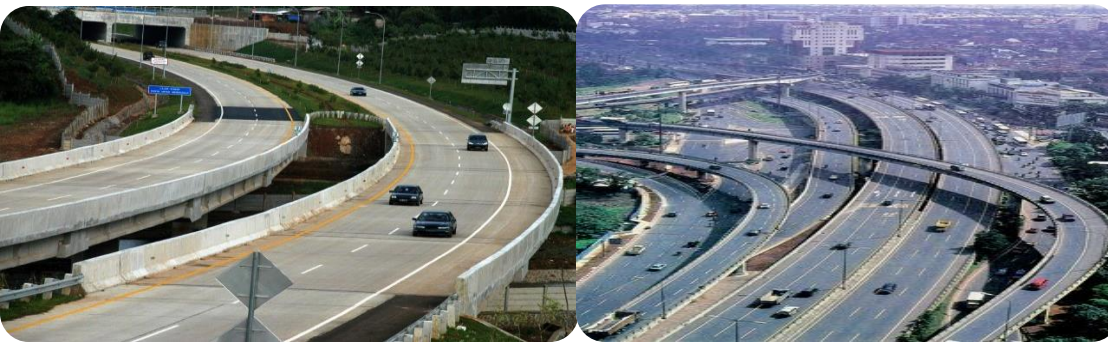
Keterangan :

JAS = Jalan Arteri Sekunder

JKS = Jalan Kolektor Sekunder

JLS = Jalan Lokal Sekunder

JLing.S = Jalan Lingkungan Sekunder



PROSEDUR PENETAPAN FUNGSI JALAN

Penetapan JAP dan JKP-1

→ Secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Menteri

Menyusun konsep penetapan JAP & JKP-1 berdasarkan RTRWN

Menyampaikan konsep kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang LLAJ

Menetapkan fungsi (JAP & JKP-1) setelah memperhatikan masukan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang LLAJ

Penetapan JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, Jling-P, JAS, JKS, JLS, dan Jling-S

→ Secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Gubernur

KHUSUS DKI JAKARTA, GUBERNUR DKI JAKARTA menetapkan ruas jalan sebagai JAS, JKS, JLS, dan Jling-S

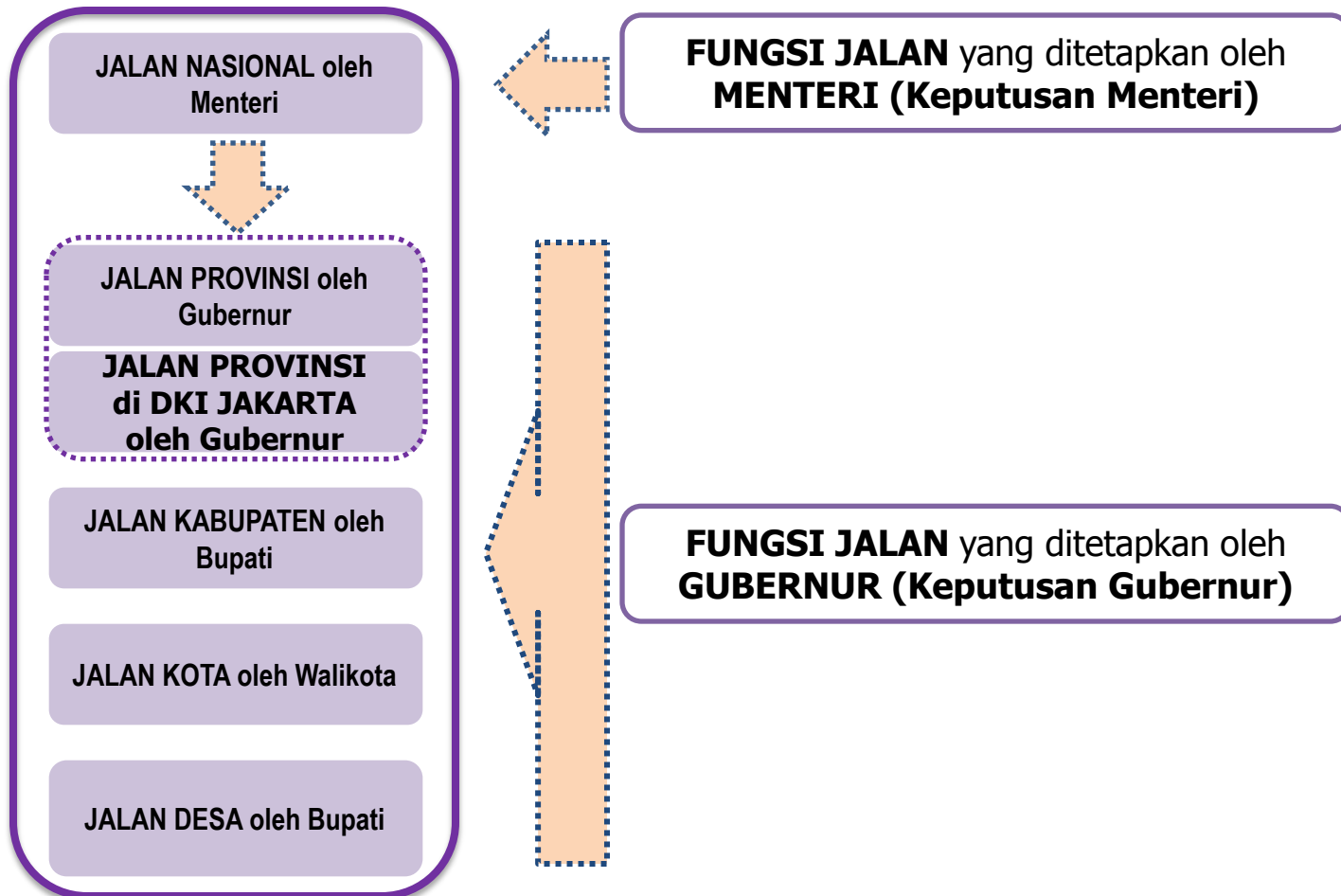
GUBERNUR menetapkan ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, Jling-P, dan semua ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder

Kepmen tentang penetapan ruas jalan sebagai **JAP & JKP-1**

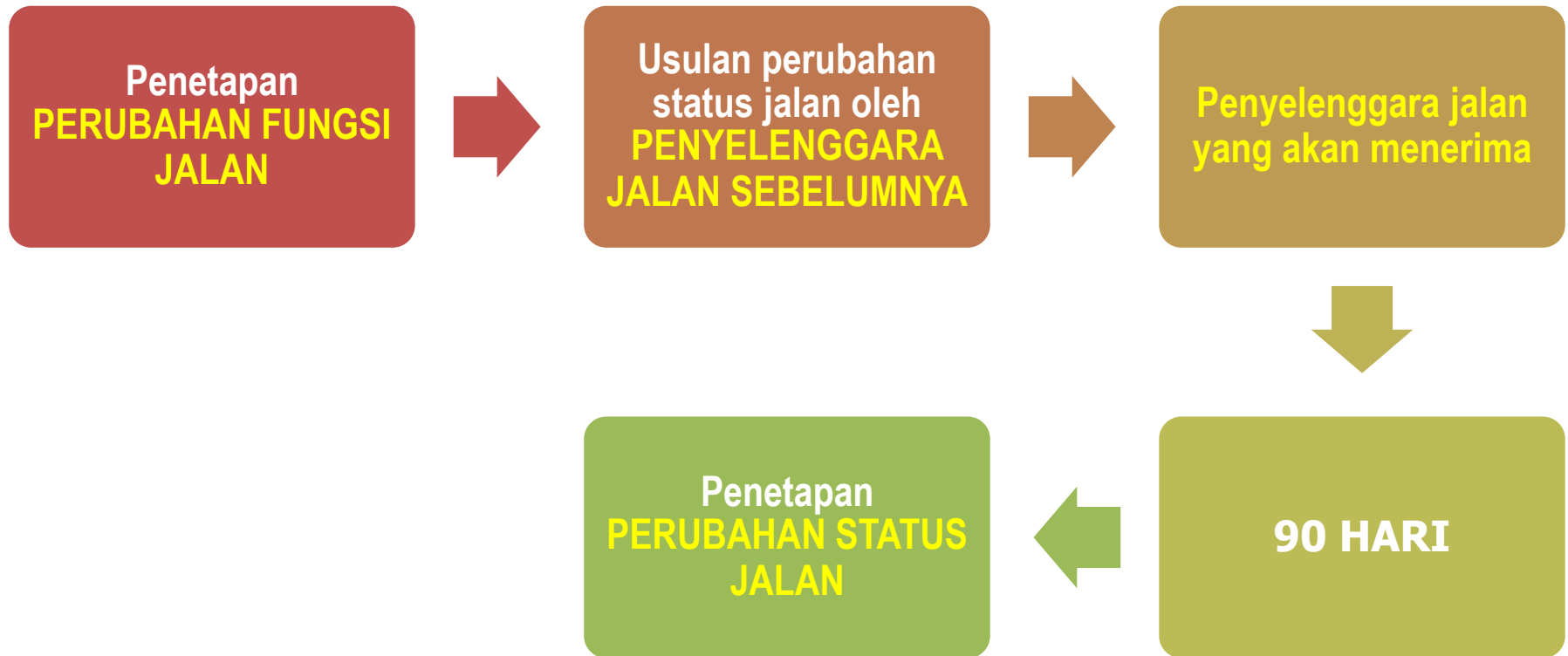
Usulan Bupati/ Walikota tentang fungsi jalan untuk ruas jalan sebagai JKP-4, JLP, Jling-P, dan semua ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder

PROSEDUR PENETAPAN STATUS JALAN

→ Secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri (Permen PU No. 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan)



PERUBAHAN STATUS JALAN



- ❖ Penetapan status jalan dapat dilakukan **PALING LAMBAT 90 HARI** sejak tanggal ditetapkannya fungsi jalan.
- ❖ Penyelenggara jalan sebelumnya **TETAP BERTANGGUNG JAWAB** atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.



2. PROFIL PROVINSI JAWA TIMUR



PROFIL PROVINSI JAWA TIMUR



Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2017 Tentang RTRWN, Provinsi Jawa Timur terdiri atas:

- a.PKN : Kawasan Perkotaan Gerbangkerto Susila dan Malang
- b.PKW : Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, Pacitan, Pasuruan, Trenggalek, Tulungagung, dan Sumenep
- c.PKSN : -
- d.Pelabuhan : Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Tanjung Bumi – Tanjung Bulu Pandan, Tanjung Pakis (LIS), Tanjung Wangi, Gresik, Bawean, Pacitan, dan Probolinggo/Tanjung Tembaga
- e.Bandara : Juanda dan Abdurrachman Saleh
- f.ASDP : Ujung, Kamal, Ketapang, Jangkar, Kalianget, Sapudi, P. Raas, Kangean, Bawean, Pacitan, Gili Ketapang, Probolinggo, Pulau Poteran, Pulau Masalembo, dan Pulau Sepanjang

PROFIL PROVINSI JAWA TIMUR

- Luas Wilayah : 47.157,72 km²
- Jumlah Penduduk : 39,97 juta penduduk (BPS 2017)
- Terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota
- Panjang ruas jalan nasional di Prov. Jawa Timur adalah 2.361,23 Km
 - a. Jalan Arteri Primer : 949,49 Km
 - b. Jalan Kolektor Primer-1 : 1.411,74 Km
- Panjang ruas jalan Provinsi : 1.421 Km
- Panjang ruas jalan Kabupaten dan Kota: 35.151,99 Km
- Berdasarkan PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPKN) bahwa ada 4 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu:
 1. KSPN Bromo – Tengger – Semeru dan sekitarnya
 2. KSPN Ijen – Baluran dan sekitarnya
 3. KSPN Trowulan dan sekitarnya
 4. KSPN Sangiran dan sekitarnya
- Berdasarkan Permenhub No. 69 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Kebandarudaraan Nasional

No.	Bandar Udara	Lokasi	Penggunaan	Hirarki
1	Juanda	Surabaya	Internasional	PP
2	Abdul Rachman Saleh	Malang	Domestik	P
3	Blimbingsari	Banyuwangi	Domestik	P
4	Trunojoyo	Sumenep	Domestik	P
5	Noto Hadinegoro	Jember	Domestik	P

PELABUHAN LAUT DI JAWA TIMUR (KP 432 / 2017)

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2017	2022	2027	2037	
XV. Provinsi Jawa Timur								
166	Bangkalan	1	Telaga Biru	PR	PR	PR	PR	*
167	Banyu Wangi	2	Tanjung Wangi	PP	PP	PP	PP	*/DW
168	Banyu Wangi	3	Ketapang	PR	PR	PR	PR	*/DW
169	Banyu Wangi	4	Banyu Wangi/ Boom	PR	PR	PR	PR	
170	Gresik	5	Bawean	PR	PR	PR	PR	*
171	Gresik	6	Gresik	PP	PP	PP	PP	*
172	Lamongan	7	Brondong	PR	PR	PR	PR	*/TK
173	Lamongan	8	Tanjung Pakis	PP	PP	PU	PU	
174	Pacitan	9	Pacitan	PP	PP	PP	PP	TK
175	Pamekasan	10	Branta	PR	PR	PR	PR	*
176	Pamekasan	11	Pasean	PL	PL	PL	PL	
177	Pasuruan	12	Pasuruan	PR	PR	PR	PR	*
178	Probolinggo	13	Probolinggo	PP	PP	PP	PP	*
179	Probolinggo	14	Giliketapang	PL	PL	PL	PL	
180	Sampang	15	Glimandangin	PL	PL	PL	PL	
181	Sampang	16	Sampang	PR	PR	PR	PR	
182	Sampang	17	Taddan	PL	PL	PR	PR	
183	Situbondo	18	Kalbut	PP	PP	PP	PP	*
184	Situbondo	19	Panarukan	PR	PR	PR	PR	*
185	Sumenep	20	Kalianget	PR	PR	PR	PR	*
186	Sumenep	21	Masalembo	PR	PR	PR	PR	*
187	Sumenep	22	Sapudi	PR	PR	PR	PR	*
188	Sumenep	23	Sapeken	PR	PR	PP	PP	*/TK
189	Sumenep	24	Kangean	PR	PR	PR	PR	
190	Sumenep	25	Keramaian	PL	PL	PR	PR	
191	Sumenep	26	P. Raas	PL	PL	PL	PL	
192	Surabaya	27	Tanjung Perak	PU	PU	PU	PU	*/**/TL/DW

PELABUHAN PENYEBRANGAN DI JAWA TIMUR (KP 432 / 2017)

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
14	Jawa Timur			
1	Paciran	Kab. Lamongan	Operasi	KELAS I
2	Bawean	Kab. Gresik	Operasi	KELAS II
3	Kamal	Kab. Bangkalan	Operasi	KELAS I
4	Ujung	Kota Surabaya	Operasi	KELAS I
5	Kalianget	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
6	Jangkar	Kab. Situbondo	Operasi	KELAS III
7	Sapeken	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
8	Pulau Raas	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
9	Kangean	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
10	Sapudi	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
11	Ketapang	Kab. Banyuwangi	Operasi	KELAS I
12	Gili Ketapang	Kab. Probolinggo	Rencana	KELAS III
13	Probolinggo	Kab. Probolinggo	Rencana	KELAS II
14	Pulau Poteran	Kab. Sumenep	Rencana	KELAS III
15	Pulau Masalembu	Kab. Sumenep	Rencana	KELAS III
16	Pulau Sepanjang	Kab. Sumenep	Rencana	KELAS III

PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU DI JAWA TIMUR (KP 432 / 2017)

NO	PELABUHAN	STATUS PENCAPAIAN	HIERARKI	KET
XII	JAWA TIMUR			
1	Kanigoro	operasi	pengumpan	
2	Binangun	operasi	pengumpan	
3	Ngraho	rencana	pengumpan	
4	Kepanjen	operasi	pengumpan	
5	Pakisaji	operasi	pengumpan	
6	Bululawang	operasi	pengumpan	
7	Sumberpucung	rencana	pengumpan	
8	Karangates	rencana	pengumpan	
9	Bangsai	rencana	pengumpan	
10	Mojosari	rencana	pengumpan	
11	Pungging	rencana	pengumpan	
12	Ngoro	rencana	pengumpan	
13	Gedeg	operasi	pengumpan	
14	Jetis	operasi	pengumpul	
15	Krain	rencana	pengumpan	
16	Porong	rencana	pengumpan	
17	Bojonegoro	rencana	pengumpul	



3. SURAT USULAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR



SURAT KEPALA BAPPEDA PROV. JAWA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pahlawan No. 102-108 Telpun (031) 3554851-57 Fax. (031) 3534339

SURABAYA 60174

Surabaya, 30 Oktober 2018

Kepada

Yth. Direktur Pengembangan
Jaringan Jalan, Direktorat
Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

di -

JAKARTA

Nomor : OSD / 13 272 / 2018 / 2018
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Perihal : Masukan Pengembangan
Jaringan Jalan Nasional
di Jawa Timur

Menindaklanjuti surat Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR nomor: HK.0108-BP/318 tanggal 19 April 2018 perihal Permohonan Masukan Pengembangan Jaringan Jalan Nasional, bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi bersama antara Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII dan Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Jawa Timur sebagai Masukan Pengembangan Jaringan Jalan Nasional di Jawa Timur (terlampir).

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. BOBBY SOEMBARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Tembusan :

1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Jawa Timur.

SURAT KEPALA BAPPEDA PROV. JAWA TIMUR

LAMPIRAN SURAT TANGGAL : 30 OKTOBER 2018
 NOMOR : 050 / 13 - 272 / 201.3 / 2018

MASUKAN PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN NASIONAL PERUBAHAN STATUS JALAN KABUPATEN/KOTA MENJADI JALAN NASIONAL

PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	NAMA RUAS	PANJANG (Km)	FUNGSI (JAP atau JKP1)	STATUS	LOKASI (KABUPATEN/ KOTA)	KOORDINAT (Derajat Dalam Desimal)		REFERENSI		ROW Rata-Rata (m)	LEBAR PERKERASAN RATA-RATA (m)	DATA TEKNIK JENIS PERKERASAN JALAN					TATA GUNA LAHAN		ALASAN PENGUSULAN **
						AWAL (Longitude (x), Latitude (y))	AKHIR (Longitude (x), Latitude (y))	AWAL	AKHIR			ASPAL (Km)	BETON (Km)	AGREGAT (Km)	TANAH (Km)	KEMANTAPAN JALAN (%)	KANAN	KIRI	
1	Jalan Argopuro	2,03	JAP	Jalan Kabupaten	Kab. Banyuwangi	114.376948, -8.1926297	114.360339, -8.183117	Perempatan Sokowidi	Pabrik Gudang Aqua	12,0	10,0	2,03	-	-	-	100	1,3	1,3	Merupakan Lingkar Barat Banyuwangi, akan Tukar Guling dengan Jalan Nasional dengan nomor Ruas 078 11K - 077 11 K
2	Jalan Argopuro	0,61	JAP	Jalan Kabupaten	Kab. Banyuwangi	114.360339, -8.183117	114.356815, -8.180477	Pabrik Gudang Aqua	Perempatan Brak	12,0	10,0	0,61	-	-	-	100	1,3	1,3	
3	Jalan Raden Wijaya	1,94	JAP	Jalan Kabupaten	Kab. Banyuwangi	114.355913, -8.182469	114.357296, -8.199632	Jembatan Brak	Pertigaan Giri	12,0	10,0	1,94	-	-	-	100	1,4	1,4	
4	Jalan Hayam Wuruk	0,11	JAP	Jalan Kabupaten	Kab. Banyuwangi	114.357296, -8.199632	114.357154, -8.200495	Pertigaan Giri	Jembatan Pertigaan Giri	14,0	12,0	0,11	-	-	-	100	2,4	2,4	
5	Jalan Hayam Wuruk	0,58	JAP	Jalan Kabupaten	Kab. Banyuwangi	114.357154, -8.200495	114.356809, -8.205853	Jembatan Pertigaan Giri	Perempatan Penataban	12,0	10,0	0,58	-	-	-	100	2,4	2,4	
6	Jalan Gajah Mada	0,59	JAP	Jalan Kabupaten	Kab. Banyuwangi	114.356809, -8.205853	114.355972, -8.211146	Perempatan Penataban	Pertigaan Gor Banyuwangi	14,0	12,0	0,59	-	-	-	100	2,4	2,4	
7	Jalan Gajah Mada	0,46	JAP	Jalan Kabupaten	Kab. Banyuwangi	114.355972, -8.211146	114.354973, -8.214928	Pertigaan Gor Banyuwangi	Perempatan Cungkling	14,0	12,0	0,46	-	-	-	100	2,4	2,4	
8	Jalan Brawijaya	0,83	JAP	Jalan Kabupaten	Kab. Banyuwangi	114.354973, -8.214928	114.352530, -8.221659	Perempatan Cungkling	Pertigaan Bakungan	14,0	12,0	0,83	-	-	-	100	2,4	2,4	
9	Jalan Brawijaya 3	2,28	JAP	Jalan Kabupaten	Kab. Banyuwangi	114.352530, -8.221659	114.358013, -8.236199	Pertigaan Bakungan	Perempatan Karangente	14,0	12,0	2,28	-	-	-	100	2,4	2,4	
10	Jl. Harun Thohir (Gresik - Sidoarjo)	1,80	JKS	Jalan Kabupaten	Kab. Gresik	(112.658654, -7.154915)	(112.661718, -7.170065)	Simpang Tiga Jalan Pelabuhan Gresik	PT Swadaya Graha	10,0	7,0	-	7	-	-	0	3,4	3,4	Intensitas kendaraan melebihi tonase yang mampu diakomodir jalan kabupaten
11	Jl. Kapten Damno Sugondo (Segoromadu - Sidoarjo)	3,40	JKS	Jalan Kabupaten	Kab. Gresik	(112.645953, -7.191945)	(112.662807, -7.174313)	PT Leewon Indonesia	Simpang Empat Segoromadu	10,0	7,0	-	3,4	-	-	0	4	4	
12	Jl. YOS Sudarso	0,10	JKS	Jalan Kabupaten	Kab. Gresik	(112.658156, -7.154858)	(112.663598, -7.155110)	Pintu Masuk Pelabuhan	Simpang Tiga Polres Gresik	20,0	12,0	-	0,1	-	-	0	3	3	
13	Jl. RE Martadinata (Roomo - Pelabuhan Gresik)	1,95	JKS	Jalan Kabupaten	Kab. Gresik	(112.660070, -7.159010)	(112.644385, -7.150505)	PT Petro Oxo	Pintu Masuk Pelabuhan	15,0	7,0	1,70	-	0,20	-	0	3	2	
14	Jl. Amak Khasim	0,60	JKS	Jalan Kabupaten	Kab. Gresik	(112.661718, -7.170065)	(112.662807, -7.174313)	PT Swadaya Graha	PT Leewon Indonesia	10,0	7,0	-	0,6	-	-	100	3,2	3,2	
15	Jalan Lingkar Mojogung	5,10	JAP	Non Status	Kab. Jombang	112.328218, -7.565556	112.367824, -7.560863	Sp. 3 Gambiran	Bts. Kab. Mojokerto	12,0	8,0	5,10	-	-	-	100	1,3	1,3	Rong road perbaikan Mojogung berfungsi sebagai jalan arteri primer
16	Jalan Lingkar Barat Kepanjen	4,56	JKP	NON STATUS	Kab. Malang	112.583648, -8.096309	112.553703, -8.117678	Pertigaan Jalan Nasional	Pertigaan Ngajum	20,0	15,0	0,80	-	-	-	100	2	2	Bypass Jalan Nasional Malang - Blitar
17	Talangagung - Ngajum	0,80	JKP	Jalan Kabupaten	Kab. Malang	112.555571, -8.127464	112.553703, -8.117678	Perempatan Talangagung (Jl. Nasional)	Pertigaan Ngajum	12,0	6,0	4,56	-	-	-	100	1	1	Bypass Jalan Nasional Malang - Blitar
18	Manglawan (Batas Kota Malang - Tumpang	15,60	JKP	Jalan Kabupaten	Kab. Malang	112.664402, -7.950298	112.755268, -8.014997	Batas Kota Malang (Jembatan Manglawan)	Pertigaan Tumpang (Tugu TMP)	5,00 - 12,00	5,00 - 10,00	15,60	-	-	-	95	2	2	Akses strategis penunjang KSPN-BTS
19	Asrikaton - Bandara Abdul Rahman Saleh	2,00	JKP	Jalan Kabupaten	Kab. Malang	112.697811, -7.936521	112.690137, -7.952751	Pertigaan Asrikaton (Monumen Pesawat)	Tugu Gerbang Bandara Abdul Rahman Saleh	11,0	7,0	2,00	-	-	-	100	2	2	Akses Strategis Pendukung Exit Tol Mapan
20	Sekarpuro - Bunut	4,10	JKP	Jalan Kabupaten	Kab. Malang	112.700871, -7.954008	112.673407, -7.971794	Batas Kota Malang (Makam)	Perempatan Bunut	10,5	6,5	4,10	-	-	-	100	2	2	Akses Strategis Pendukung Exit Tol Mapan
21	Tumpang - Tulusbesar (Ruas asal : Tumpang - Wonomulyo)	1,50	JKP	Jalan Kabupaten	Kab. Malang	112.755267, -8.015005	112.767396, -8.021191	Pertigaan Tumpang/ Tugu TMP	Perempatan Tulusbesar (Masjid)	10,0	6,0	3,50	-	-	-	67	2	2	Akses strategis penunjang KSPN-BTS
22	Jalan Lingkar Luar Timur Sidoarjo (Candi - Prusung dan Prusung - Bangkarmantren)	10,80	JKP1	Non Status	Kab. Sidoarjo	(112.713703861498, -7.48061810300941)	(112.72589924454, -7.4126482915321)	Candi	Bangkarmantren, Buduran	12,0	7,0	10,80	-	-	-	80	1,2,3	1,2,3	Jalan Penghubung antar Kab./Kota (Surabaya-Malang)
23	Aya Wirajaya	2,90	JAP	Jalan Kabupaten	Kab. Sumenep	152425,12; 9222108,14	154894,0; 9222809,49	Jalan Nasional	Jalan Propinsi	13,0	10,0	2,90	-	-	-	100	1,5	1,5	Akses Pelabuhan Kallang, Tukar guling dengan jalan nasional ruas : Jn. Jend Sudirman (R. 115.11.K), Jn. A. Yani (R. 115.12.K), dan Unp Somoharjo (R.115.13.K)

SURAT KEPALA BAPPEDA PROV. JAWA TIMUR (2)

MASUKAN PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN NASIONAL PERUBAHAN STATUS JALAN KABUPATEN/KOTA MENJADI JALAN NASIONAL

PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	NAMA RUAS	PA NJANG (Km)	FUNGSI (JAP atau JKP1)	STATUS	LOKASI (KABUPATEN/ KOTA)	KOORDINAT (Derajat Dalam Desimal)		REFERENSI		ROW Rata-Rata (m)	LEBAR PERKERASA N RATA- RATA (m)	DATA TEKNIS JENIS PERKERASAN JALAN					TATA GUNA LAHAN		ALASAN PENGUBAHAN **
						AWAL (Longitude (x), Latitude (y))	AKHIR (Longitude (x), Latitude (y))	AWAL	AKHIR			ASPAL (Km)	BETON (Km)	AGREGAT (Km)	TANAH (Km)	KEHANTAP AN JALAN (%)	KANAN	KIRI	
24	Montong-Jojogan	13,35	JKP1	Jalan Kabupaten	Kab. Tuban	(06.950039,111.881241)	(06.969804,111.778720)	Gapura batas Kec.	Jl. P. 032	10,0	7,0	13,35				80	1	1	Akses menuju industri semen dan membuka akses industri migas
25	Montong-Sumberanum	9,27	JKP1	Jalan Kabupaten	Kab. Tuban	(06.950039,111.881241)	(06.875778,111.895696)	Tugu Montong/10/25	27/20	10,0	7,0	9,27				80	1	1	Akses menuju industri semen dan membuka akses industri migas
26	Glondong-Sumberanum	10,20	JKP1	Jalan Kabupaten	Kab. Tuban	(06.792018,111.892559)	(06.875778,111.895696)	Jl. N. 031	26/27	10,0	7,0	10,20	-	-	-	80	1,4	1,4	Akses menuju industri semen dan membuka akses industri migas
27	Sugihwaras-Bogorejo-Tunah	13,30	JAP	non status	Kab. Tuban	(06.861698,112.028699)	(06.899188,112.113946)	Jl. N. 031	Jl. N. (SDN Tunah)	30,0	14,0	2,70			12,5	18	2,4	2,4	Mengenal kemacetan lalu lintas dan sebagai pengembangan perkotaan Tuban
28	Ruas Pulosari - Bujur	5,59	JKP1	Jalan Kabupaten	Kab. Tulungagung	(111.979860;-8.090367)	(111.969344;-8.096000)	Jalan Nasional Ruas 054 Kota Tulungagung - Bts. Kab. Blitar	Jalan Jalan Lingkar Timur Tulungagung	9,0	4,5	5,59				65	2	2	Sebagai jalan lingkar timur Tulungagung yang menghubungkan Jalan Nasional dengan Jalan Provinsi. Pada tahun 2019 Jembatan Ngagung II telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI
29	Jalan LA.Sucipto	1,93	JKP1	Jalan Kota	Kota Malang	-7943735 ; 112.648250	-7950220 ; 112664440	Sp.JLLA Sucipto- Jl.Panji Su reso	Jembatan Kaliori Bts. Kab.Malang	20,00	14,00	1,93	-	-	-	100	1,3	1,3	Exit tol Malang-Pandean, Tular Guling dengan Jalan Nasional ruas 102 (13 K + 18 K)
30	Jalan KI Ageng Gribig	2,20	JKP1	Jalan Kota	Kota Malang	-7971107 ; 112673703	-7993929 ; 112647800	Tugu Perbatasan Jl.Sekampung- J.KA.Gribig	Simp. J.KA.Gribig- Jl.Muharto-	12,00	8,00	2,20	-	-	-	100	1,3	1,3	
31	Jalan Njayend Sungkono	5,30	JKP1	Jalan Kota	Kota Malang	-7994000 ; 112647741	-8046937 ; 112642345	Simp. J.KA.Gribig- J.Muharto-	Tugu Batas Wilayah	18,00	12,00	5,30	-	-	-	100	1,3	1,3	
32	Jalan Rajasa	1,07	JKP1	Jalan Kota	Kota Malang	-8026689 ; 112642805	-8024807 ; 112633903	Simp.J.M.Su ngkono- Jl. Rajasa	Simp.Jl.Rajas a-Jl.Jiyai Parseh Jaya	21,80	17,80	1,07	-	-	-	100	1,3	1,3	
33	Jalan Raya Gadang	0,73	JKP1	Jalan Kota	Kota Malang	-8024472 ; 112633452	-8022838 ; 112627621	Simp.Jl.Rajas a-Jl.Jiyai Parseh Jaya	Simp.Jl.Gada ng Bumayu- Jl.Satui	9,60	9,60	0,73	-	-	-	100	1,3	1,3	
34	Panglima Sudirman (Perempatan Radupanggeng s/d Batas Kota)	0,83	JKP1	Non Status	Kota Probolinggo	(-7.759206 ; 113.228882)	(-7.762590 ; 113.235961)	Perempatan Randupanggeng(BM Sloy 99+940)	Batas Kota (KM Sloy 100+770)	31,0	28,0	0,83				80	1	1	Jaringan Jalan Nasional Supaya tidak terputus

Catatan :

- Seluruh ruas harus dilengkapi peta digital berformat Shapefile dengan Datum WGS84
- Data atribut Shapefile harus diisi mengikuti pada kamus data sesuai Permen PUPR Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- JAP : Jalan Ateri Primer, JKP1 : Jalan Kolektor Primer 1
- *Kode tata Guna Lahan
 - Sewah/Kebun/Hutan (Rural)
 - Perumahan (Urban 1)
 - Perindustrian (Urban2)
 - Perdagangan/Perkantoran/Pasar (Urban3)
- **Kesesuaian terhadap RTRW (PKN, PKW, PKSN, KSN, KSPN, KEK, PSN dan SISTRAPUAS (Pelabuhan Laut Utama/Pengumpul, Bandar Udara Utama/Pengumpul, Pelabuhan Penyeberangan Kelas I, Terminal Tipe A)

Surabaya, Oktober 2018
an Oleh
Jawa Timur

Dr. BORRY SRI

SURAT KEPALA BAPPEDA PROV. JAWA TIMUR (3)

LAMPIRAN SURAT TANGGAL : 240
 NOMOR : 68/VI/2018/272 / 38A / 35/2018

MASUKAN PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN NASIONAL PERUBAHAN STATUS JALAN NASIONAL MENJADI JALAN KABUPATEN/KOTA

PROVINSI: JAWA TIMUR

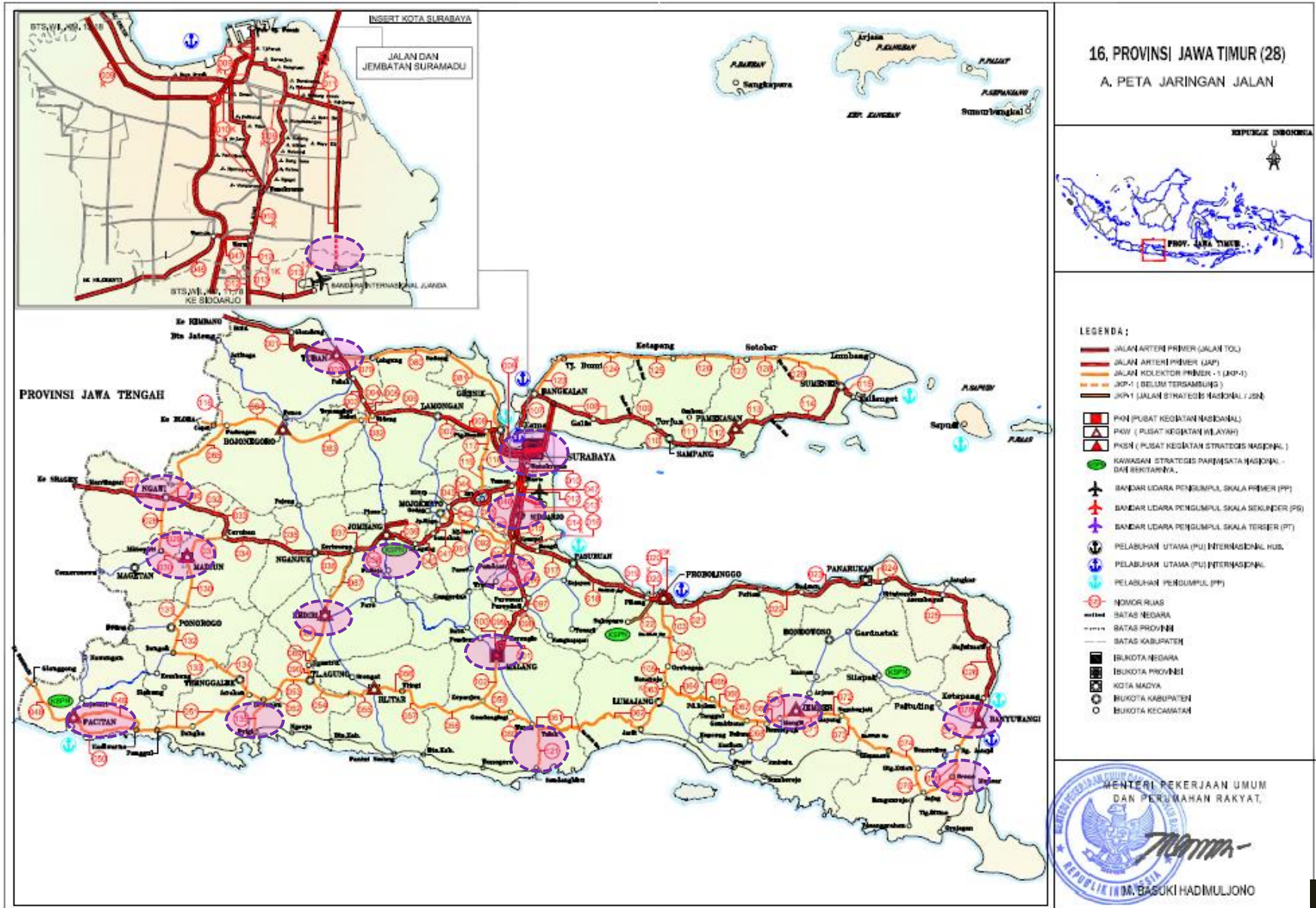
NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (Km)	FUNGSI (JAP atau JKP)	STATUS	LOKASI (KABUPATEN/ KOTA)	KOORDINAT (Derajat Dalam Desimal)		REFERENSI		DATA TEKNIK							ALASAN PENGUSULAN **
							AWAL (Longitude (x), Latitude (y))	AKHIR (Longitude (x), Latitude (y))	AWAL	AKHIR	ROW Rata-Rata (m)	LEBAR PEREBARAN RATA-RATA (m)	ASPAL (Km)	BETON (Km)	AGREGAT (Km)	TANAH (Km)	KEMAMTAPAN JALAN (%)	
1	078 UK	Jalan Basuki Rahmat	1,75	JAP	Jalan Nasional	Kab. Banyuwangi	114.376482, -8.193536	114.373657, -8.205836	Simpang Tiga Sokowid	Simpang Empat Lateng	14	12	1,75	-	-	-	100	Tukar Guling dengan Lingkar Barat Banyuwangi
2	077 54K	Jalan PB Sudirman	1,03	JKP1	Jalan Nasional	Kab. Banyuwangi	114.373657, -8.205836	114.370464, -8.215442	Simpang Empat Lateng	Simpang Lima Banyuwangi	14	12	1,03	-	-	-	100	
3	077 53K	Jalan Ahmad Yani	1,30	JKP1	Jalan Nasional	Kab. Banyuwangi	114.370464, -8.215442	114.366090, -8.226287	Simpang Lima Banyuwangi	Simpang Tiga DPRD Banyuwangi	14	12	1,30	-	-	-	100	
4	077 52K	Jalan Adi Sucipto	1,41	JKP1	Jalan Nasional	Kab. Banyuwangi	114.366090, -8.226287	114.358180, -8.236254	Simpang Tiga DPRD Banyuwangi	Simpang Empat Karangente	14	12	1,41	-	-	-	100	
5	081 14 K	Jl. Dr Soetomo	1,00	JKP - 1	Jalan Nasional	Kab. Gresik	(112.646850, -7.160768)	(112.640756, -7.164962)	Simpang Lima Petrolimia	Simpang Empat Kebomas	15	11	1,00	-	-	-	100	Tukar guling dengan usulan perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan nasional
6	081 13 K	Jl. Usman sadar	1,00	JKP - 1	Jalan Nasional	Kab. Gresik	(112.651190, -7.152806)	(112.646850, -7.160768)	Simpang Empat Pasar Gresik	Simpang Lima Petrolimia	15,6	11	1,00	-	-	-	100	
7	081 12 K	Jl. Gubemur Suryo (S)	0,80	JKP - 1	Jalan Nasional	Kab. Gresik	(112.641184, -7.149580)	(112.651190, -7.152806)	Simpang Empat Kawasan Industri Gresik	Simpang Empat Pasar Gresik	16,2	12	0,80	-	-	-	100	
8	802	Jalan Lingkar Barat Kepanjen (Ruas asal: Bts. Kota Malang - Kepanjen)	1,00	JKP - 1	Jalan Nasional	Kab. Malang	112.583654; -8.096313	112.589246; -8.131746					1,00					Tukar guling dengan usulan perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan nasional
9	115 11 K	Jendral Sudirman	0,55	JAP	Jalan Nasional	Kab. Sumenep	113,8597; -7,00676	113,94315; -7,04937	Simpang Empat (Odeng)	Simpang Lima Lampu Nterah	10	8	0,55				100	Menupakan jalan perkotaan, Tukar guling dengan usulan perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan nasional
10	115 12 K	Ahmad Yani	0,45	JAP	Jalan Nasional	Kab. Sumenep	113,8597; -7,00676	113,94315; -7,04937	Simpang Lima Lampu Nterah	Simpang Empat PLN	10	8	0,45	-	-	-	100	
11	115 13 K	Urip Sumoharjo	1,65	JAP	Jalan Nasional	Kab. Sumenep	113,8597; -7,00676	113,94315; -7,04937	Simpang Empat PLN	Simpang Tiga (rumah dinas Kapoles)	10	8	1,65				100	
12	102 13 K	Jl.R.Sunandar Priyo Sudarmo	2,05	JKP - 1	Jalan Nasional	Kota Malang	-7.943767, 112.648210	-7.957923, 112.643702	Sp.Jl. LA Sucipto-Jl.Panji Suroso	Sp.Jl.Tumenggung Suryo Jl.Cinulan	17	12	2,05	-	-	-	100	Tukar guling dengan usulan perubahan status jalan kota menjadi jalan nasional
13	102 14 K	Jl.Tumenggung Suryo	0,95	JKP - 1	Jalan Nasional	Kota Malang	-7.957923, 112.643702	-7.966934, 112.638626	Jl.R.Sunandar Priyo Sudarmo	Jl.Panglima Sudirman	17	12	0,95	-	-	-	100	
14	102 15 K	Jl.Panglima Sudirman	1,75	JKP - 1	Jalan Nasional	Kota Malang	-7.966934, 112.638626	-7.980884, 112.637917	Jl.Tumenggung Suryo	Jl.Gatot Subroto	15,5	12	1,75	-	-	-	100	
15	102 16 K	Jl.Gatot Subroto	0,30	JKP - 1	Jalan Nasional	Kota Malang	-7.980884, 112.637917	-7.987077, 112.635716	Jl.Panglima Sudirman	Jl.Laksamana MTWIRUALLI	12	12	0,30	-	-	-	100	
16	102 17 K	Jl.Laksamana Martadinata	0,77	JKP - 1	Jalan Nasional	Kota Malang	-7.987077, 112.635716	-7.993523, 112.633576	Jl.Gatot Subroto	Jl.Kol.Sugiono	12	12	0,77	-	-	-	100	
17	102 18 K	Jl.Kol.Sugiono	3,30	JKP - 1	Jalan Nasional	Kota Malang	-7.993523, 112.633576	-8.022803, 112.627602	Jl.Laksamana Martadinata	Simpul3Gading Bumayu-Jl.Satubul	13	12	3,30	-	-	-	100	

Catatan :
 * Seluruh ruas harus dilengkapi peta digital berformat Shapefile dengan Datum WGS84
 * Data atribut Shapefile harus diisi mengikuti pada karnus data sesuai Permen PUPR Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 * JAP : Jalan Atrai Primer, JKP1 : Jalan Kolektor Primer 1
 * Kode tata Guna Lahan
 1. Sawah/Kebun/Hutan (Rural)
 2. Perumahan (Urban 1)
 3. Perkotaan (Urban2)
 4. Perkotaan/Perkantoran/Pasar (Urban3)
 * **Kesesuaian terhadap RTRW (PKN, PKM, PKSN, KSN), KSPN, KEK, PSN dan SISTRANAS (Pelabuhan Laut Utama/Pengumpul, Bandar Udara Utama/Pengumpul, Pelabuhan Penyeberangan Kelas I, Terminal Tipe A)

Oktober 2018
 Bth
 J.Jawa Timur

(Handwritten signature)

USULAN PROVINSI JAWA TIMUR





4. REKAPITULASI EVALUASI USULAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR





KRITERIA EVALUASI: (I) ADMINISTRASI

A. Kesesuaian Arah Rencana Tata Ruang dan Wilayah

- JAP menghubungkan antara PKN-PKN, PKN-PKW, PKN/PKW-PU, PKN/PKW-PP, PKN/PKW-BU, PKN/PKW-BP,
- JKP 1 menghubungkan antar Ibukota Provinsi
- JSN menghubungkan PKN/PKW-PKSN, PKN/PKW-KSN, PKSN-PKSN

B. Hierarki Outlet dalam Sistem Transportasi Nasional

- Pelabuhan Utama dan Pengumpul berdasarkan Permen Perhubungan No. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional,
- Bandara Pengumpul Skala Primer, Sekunder dan Tersier berdasarkan Permen Perhubungan No.69 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Kebandarudaraan Nasional
- Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Kelas I berdasarkan Permen Perhubungan No. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
- Terminal Tipe A berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No.SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan untuk Terminal Penumpang Tipe A Di Seluruh Indonesia

C. Perubahan Fungsi Jalan

D. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang didukung/diakses telah menjadi Perpres

E. KSPN (Pariwisata) yang didukung/diakses adalah kawasan yang ber-irisan dengan KSN yang telah menjadi Perpres

F. Tidak memenuhi kelima kriteria diatas



KRITERIA EVALUASI: (II) TEKNIS

Kondisi jalan minimal sedang (dengan perkerasan)

Lebar jalan minimal 6 m

Mampu menyediakan ROW minimal 25 m (disertai dengan surat kesanggupan Pemerintah Daerah)

Mampu menjaga tata guna lahan pada kedua sisi jalan (mengurangi hambatan samping)

Terdapat penanganan sesuai kewenangan (Pemerintah Daerah) selama 5 tahun terakhir

→ Kondisi jalan dan lebar ROW menentukan prioritas dalam perubahan fungsi dan status jalan menjadi jalan nasional.

REKAP USULAN BAPPEDA JAWA TIMUR

No	Nama Ruas	Kabupaten	Panjang (km)	Alasan Pengusulan	Status Jalan
1	Jalan Argopuro, Jalan Raden Wijaya, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Brawijaya, Jalan Brawijaya 3	Kab. Banyuwangi	9,43	Lingkar Barat Banyuwangi, akan tukar guling dengan Jalan Nasional dengan nomor Ruas 078 11K – 077 11 K	Jalan Kabupaten
2	Jl. Harun Thohir (Gresik – Sidorukun), Jl. Kapten Darmo Sugondo (Segoromadu – Sidorukun), Jl. Yos Sudarso, Jl. RE Martadhinata (Roomo – Pelabuhan Gresik) , Jl. Amak Khasim	Kab. Gresik	7,85	Intensitas kendaraan melebihi tonase yang mampu diakomodir jalan kabupaten	Jalan Kabupaten
3	Jalan Lingkar Mojoagung	Kab. Jombang	5,10	<i>Ringroad</i> perkotaan Mojoagung berfungsi sebagai jalan arteri primer	Non-Status
4	Jalan Lingkar Barat Kepanjen, Talangagung – Nganjum	Kab. Malang	5,36	<i>Bypass</i> Jalan Nasional Blitar – Malang	Non-Status
5	Mangliawan (Batas Kota Malang) – Tumpang, Tumpang – Tulusbesar (Ruas Asai: Tumpang – Wonomulyo)	Kab. Malang	17,10	Akses strategis penunjang KSPN-BTS	Jalan Kabupaten
6	Asrikaton – Bandara Abdul Rahman Saleh, Sekarpuro – Bunut	Kab. Malang	6,10	Akses strategis pendukung exit Tol Mapan	Jalan Kabupaten
7	Jalan Lingkar Luar Timur Sidoarjo (Candi – Prasung dan Prasung – Banjarkemantren)	Kab. Sidoarjo	10,80	Jalan Penghubung antar Kab/Kota (Surabaya – Malang)	Non-Status
8	Arya Wiraraja	Kab. Sumenep	2,90	Akses Pelabuhan Kalianget, tukar guling dengan jalan nasional ruas : Jln. Jend. Sudirman (R.115 UK), Jln. A. Yani (R.115 12K) dan Urip Somoharjo (R.U5 13K)	Jalan Kabupaten
9	Montong – Jojogan, Montong – Sumberarum, Glondong – Sumberarum	Kab. Tuban	32,82	Akses menuju industri semen dan membuka akses industri migas	Jalan Kabupaten
10	Sugiharas – Bogorejo – Tunah	Kab. Tuban	15,20	Mengurai kemacetan lalu lintas dan sebagai pengembangan perkotaan Tuban	Non-Status
11	Ruas Pulosari – Bukur	Kab. Tulungagung	5,59	Sebagai jalan lingkar timur Tulungagung yang menghubungkan Jalan Nasional dengan Jalan Provinsi. Pada tahun 2019 Jembatan Ngujang II telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI	Jalan Kabupaten
12	Jalan LA. Sucipto, Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Mayjend Sungkono, Jalan Rajasa, Jalan Raya Gadang	Kota Malang	11,23	Exit Tol Malang-Pandaan, Tukar guling dengan Jalan Nasional Ruas 102 (13K-18K)	Jalan Kota
13	Panglima Sudirman (Perempatan Radupangger s/d Batas Kota)	Kota Probolinggo	0,83	Jaringan jalan nasional supaya tidak terputus	Non-Status

RESUME HASIL ANALISIS

Total panjang ruas yang diusulkan Pemprov Jawa Timur	130,31 KM
Total panjang ruas jalan yang berpotensi menjadi jalan nasional	24,50 KM
Total panjang ruas jalan yang belum berpotensi menjadi jalan nasional	105,81 KM
Hasil Analisis Tambahan:	
1. Berpotensi <i>upgrade</i> /naik status	38,20 KM
2. Berpotensi <i>downgrade</i> /turun status: <ul style="list-style-type: none">•Terdampak dari ruas <i>upgrade</i> (19,39 KM)*•Analisis tambahan tetapi berpotensi untuk <i>downgrade</i> (91,86 KM)•Ruas jalan nasional baru pada SK 2015 tetapi berpotensi untuk <i>downgrade</i> (151,49 KM)	262,74 KM

Catatan: dari 20,26 km tersebut terdapat 5 (lima) ruas jalan yang harus di-*downgrade* namun belum tercantum dalam Berita Acara, yaitu:

014.11K Jln. Layang Sidoarjo
015.11K Jln. Gatot Subroto (Sidoarjo)
015.12K Jln. Sunandar P. Sudarmo (Sidoarjo)
015.13K Jln. Diponegoro (Sidoarjo)
015.14K Jln. Thamrin (Sidoarjo)

RUAS JALAN YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI JALAN NASIONAL (1)

No.	Nama	Panjang	Asal Status Jalan			Perubahan Status Jalan Menjadi	Justifikasi
			Provinsi	Kabupaten	Kota		
1.	Jl. RE Martadinata (Roomo – Pelabuhan Gresik)	2,45	-	Gresik	-	Jalan Nasional	Akses Pelabuhan Gresik
2.	Jalan Lingkar Mojoagung	5,10	-	Jombang	-	Jalan Nasional	Tukar guling (alternatif) ruas 039 (Bts Kota Jombang – Bts Kab Mojokerto)
3.	Jalan Lingkar Barat Kepanjen, Talangagung – Nganjum	5,75	-	Malang	-	Jalan Nasional	Tukar guling ruas 102 (Bts Kota Malang – Kepanjen) karena sulit dilakukan pelebaran (padat kawasan komersil)
4.	Jalan Lingkar Timur Sidoarjo	10,90	-	Sidoarjo	-	Jalan Nasional	Tukar guling ruas 012.11K-15K, 014.11K, dan 015.11K-15K (dalam Kota Sidoarjo)
5.	Jln. P. Sudirman (Pilang - Probolinggo) (Probolinggo) (020 12K) *penambahan panjang jalan nasional	0,30 (0,61 → 0,91)	-	Probolinggo	-	Jalan Nasional	<i>missing link</i>

RUAS JALAN YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI JALAN NASIONAL (2)

No.	Nama	Panjang	Asal Status Jalan			Perubahan Status Jalan Menjadi	Justifikasi
			Provinsi	Kabupaten	Kota		
6.	Jalan dan Jembatan Suramadu	6,10	-	-	-	Jalan Nasional	Penyerahan dari BUJT
7.	Jalan Akses Suramadu	11,34	-	-	-	Jalan Nasional	Penyerahan dari BUJT
8.	Jalan Akses Bandara Juanda (Sidoarjo) (013 11K) *penambahan panjang jalan nasional	1,60 (3,15 → 4,75)	-	Sidoarjo	-	Jalan Nasional	<i>missing link</i>
9.	Gempol By Pass	3,22	-	Sidoarjo	-	Jalan Nasional	Tukar guling ruas 016 (Gempol – Bts Kota Bangil) karena jalur kendaraan berat
10.	Lingkar Pacitan	4,36	-	Pacitan	-	Jalan Nasional	Tukar guling ruas 048.12K (Jl. Gatot Subroto) dan 049.11K (Jl. Jend. Sudirman)
10.	Lawean – Sukapura (122) *penambahan panjang jalan nasional	11,58 (20,21 → 31,79)	-	Probolinggo	-	Jalan Nasional	Akses ke pintu gerbang KSPN Bromo – Tengger – Semeru

RUAS JALAN YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI JALAN DAERAH (1)

No	Nama	Panjang	Asal Status Jalan	Perubahan Status Jalan Menjadi			Justifikasi
				Provinsi	Kabupaten	Kota	
1.	039 - Bts Kota Jombang – Bts Kab Mojokerto	4,80	Nasional	-	Jombang	-	Tukar guling jalan daerah
2.	102 - Bts Kota Malang – Kepanjen *pengurangan sebagian panjang	4,16 (13,26 – 9,10)	Nasional	-	Malang	-	Tukar guling jalan daerah
3.	012.11K Jln. RM. Mangun Diprojo (Sidoarjo) *pengurangan sebagian panjang	2,12 (2,63 – 0,51)	Nasional	-	Sidoarjo	-	Tukar guling jalan daerah
4.	012.12K Jln. Jenggolo (Sidoarjo)	0,75	Nasional	-	Sidoarjo	-	Tukar guling jalan daerah
5.	012.13K Jln. A. Yani (Sidoarjo)	0,91	Nasional	-	Sidoarjo	-	Tukar guling jalan daerah
6.	012.14K Jln. Gajah Mada (Sidoarjo)	0,99	Nasional	-	Sidoarjo	-	Tukar guling jalan daerah
7.	012.15K Jln. Mojopahit (Sidoarjo)	1,19	Nasional	-	Sidoarjo	-	Tukar guling jalan daerah
8.	014.11K Jln. Layang Sidoarjo	0,60	Nasional	-	Sidoarjo	-	Tukar guling jalan daerah
9.	015.11K Jln. Gatot Subroto (Sidoarjo)	0,36	Nasional	-	Sidoarjo	-	Tukar guling jalan daerah
10.	015.12K Jln. Sunandar P. Sudarmo (Sidoarjo)	1,17	Nasional	-	Sidoarjo	-	Tukar guling jalan daerah
11.	015.13K Jln. Diponegoro (Sidoarjo)	0,95	Nasional	-	Sidoarjo	-	Tukar guling jalan daerah
12.	015.14K Jln. Thamrin (Sidoarjo)	0,29	Nasional	-	Sidoarjo	-	Tukar guling jalan daerah
13.	015.15K Jln. Candi (Sidoarjo) *pengurangan sebagian panjang	1,10 (1,36 – 0,26)	Nasional	-	Sidoarjo	-	Tukar guling jalan daerah
	Jl. Dr. Soetomo, Jl. Usman Sadar, Jl. Gubernur Suryo (Kab. Sumenep)						Tidak jadi <i>di-downgrade</i>

RUAS JALAN YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI JALAN DAERAH (2)

No	Nama	Panjang	Asal Status Jalan	Perubahan Status Jalan Menjadi			Justifikasi
				Provinsi	Kabupaten	Kota	
14.	009.1AK - Jl Kapasari	0,89	Nasional	-	-	Surabaya	Sulit untuk pengembangan
15.	009.1BK - Jl Kusuma Bangsa	1,72	Nasional	-	-	Surabaya	Sulit untuk pengembangan
16.	009.1CK - Jl. Gubeng Stasiun	0,26	Nasional	-	-	Surabaya	Sulit untuk pengembangan
17.	009.1DK - Jl. Raya Gubeng	0,52	Nasional	-	-	Surabaya	Sulit untuk pengembangan
18.	009.1EK - Jl. Biliton	0,70	Nasional	-	-	Surabaya	Sulit untuk pengembangan
19.	009.1FK - Jl. Sulawesi	0,49	Nasional	-	-	Surabaya	Sulit untuk pengembangan
20.	009.1GK - Jl. Raya Ngagel	3,00	Nasional	-	-	Surabaya	Sulit untuk pengembangan
21.	009.1HK - Jl. Kencana/B. Tomo	0,23	Nasional	-	-	Surabaya	Sulit untuk pengembangan
22.	009.1IK - Jl. Ratna/Upajiwa	0,39	Nasional	-	-	Surabaya	Sulit untuk pengembangan
23.	009.1JK - Jl. Wonokromo Stasiun	0,54	Nasional	-	-	Surabaya	Sulit untuk pengembangan
24.	011.12K - Jl. Kenjeran *pengurangan sebagian panjang	1,25 (4,88-3,63)	Nasional	-	-	Surabaya	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
25.	015 - Bts Kota Sidoarjo – Gempol *pengurangan sebagian panjang	3,93 (7,20-3,27)	Nasional	-	Sidoarjo	-	Terdampak Lumpur Lapindo
26.	016 - Gempol – Bts Kota Bangil *pengurangan sebagian panjang	2,85 (9,55-6,70)	Nasional	-	Pasuruan	-	Terdampak Lumpur Lapindo
27.	094 - Gempol – Pandaan *pengurangan sebagian panjang	0,75 (11,85-11,10)	Nasional	-	Pasuruan	-	Terdampak Lumpur Lapindo
28.	027.11K - Jl. Gubernur Suryo (Ngawi)	1,46	Nasional	-	Ngawi	-	Sulit untuk pengembangan
29.	027.12K - Jl. P.B Sudirman (Ngawi)	1,44	Nasional	-	Ngawi	-	Sulit untuk pengembangan
30.	028.11K - Jl. A. Yani (Ngawi)	2,00	Nasional	-	Ngawi	-	Sulit untuk pengembangan
31.	031.13K - Jl. Soekarno – Hatta	1,40	Nasional	-	Ngawi	-	Sulit untuk pengembangan
32.	032.11K - Jl. Basuki Rahmat (Ngawi)	1,68	Nasional	-	Ngawi	-	Sulit untuk pengembangan
33.	032.12K - Jl. Sukowati (Ngawi)	1,81	Nasional	-	Ngawi	-	Sulit untuk pengembangan

RUAS JALAN YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI JALAN DAERAH (3)

No	Nama	Panjang	Asal Status Jalan	Perubahan Status Jalan Menjadi			Justifikasi
				Provinsi	Kabupaten	Kota	
34.	087.11K - Jl. Mayjen Sungkono	0,78	Nasional	-	-	Kediri	Jalan nasional paralel
35.	087.12K - Jl. Mayor Bismo *pengurangan sebagian panjang	1,12 (1,62-0,5)	Nasional	-	-	Kediri	Jalan nasional paralel
36.	087.13K - Jl. Diponegoro	0,74	Nasional	-	-	Kediri	Jalan nasional paralel
37.	087.14K - Jl. Hasanuddin	0,62	Nasional	-	-	Kediri	Jalan nasional paralel
38.	087.15K - Jl. Teuku Umar	0,34	Nasional	-	-	Kediri	Jalan nasional paralel
39.	087.16K - Jl. Imam Bonjol	0,81	Nasional	-	-	Kediri	Jalan nasional paralel
40.	087.17K - Jl. A. Yani	0,57	Nasional	-	-	Kediri	Jalan nasional paralel
41.	087.18K - Jl mayjen Suprpto	0,58	Nasional	-	-	Kediri	Jalan nasional paralel
42.	087.19K - Jl. Letjen Sutoyo	0,65	Nasional	-	-	Kediri	Jalan nasional paralel
43.	087.1AK - Jl. Di Panjaitan	0,37	Nasional	-	-	Kediri	Jalan nasional paralel
44.	087.1BK - Jl. Letjen S. Parman	1,17	Nasional	-	-	Kediri	Jalan nasional paralel
45.	087.1CK - Jl. Letjen MT Haryono	0,44	Nasional	-	-	Kediri	Jalan nasional paralel
46.	087.1DK - Jl. Brigjen Katamso	0,61	Nasional	-	-	Kediri	Jalan nasional paralel
47.	048.11K - JL. WR Supratman *pengurangan sebagian panjang	0,20 (1,78-1,58)	Nasional	-	Pacitan	-	Jalan nasional paralel
48.	048.12K - Jl. Gatot Subroto	2,23	Nasional	-	Pacitan	-	Jalan nasional paralel
49.	049.11K - JL. Jend. Sudirman	1,26	Nasional	-	Pacitan	-	Jalan nasional paralel
50.	049.12K - JL. Manggribi	0,51	Nasional	-	Pacitan	-	Jalan nasional paralel
51.	049 - Bts. Kota Pacitan – Bts. Kab Trenggalek *pengurangan sebagian panjang	39,40 (56,94-17,54)	Nasional	-	Pacitan	-	Jalan nasional paralel
52.	096 - Pandaan – Purwosari *pengurangan sebagian panjang	2,15 (15,18-13,03)	Nasional	-	Pasuruan	-	Jalan nasional paralel
53.	106 - Srono – Muncar	10,00	Nasional	-	Banyuwangi	-	Tidak menghubungkan

RUAS JALAN YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI JALAN DAERAH (4)

No	Nama	Panjang	Asal Status Jalan	Perubahan Status Jalan Menjadi			Justifikasi
				Provinsi	Kabupaten	Kota	
54.	130 - Bts Kota Madiun – Bts. Kab Ponorogo	15,56	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
55.	130.11K - Jl. Raya Madiun – Ponorogo (Madiun)	0,58	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
56.	131 Bts Kab Madiun – Bts Kota Ponorogo	5,23	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
57.	131.11K - Jl. Arif Rachman Hakim (Ponorogo)	1,73	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
58.	131.12K - Jl. Letjen S. Parman (Ponorogo)	1,80	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
59.	131.13K - Jl. MT Haryono (Ponorogo)	1,66	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
60.	132 - Bts Kota Ponorogo – Dengok	2,86	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
61.	132.11K - Jl. Diponegoro (Ponorogo)	0,57	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
62.	132.12K - Jl. Alun-Alun Barat (Ponorogo)	0,21	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
63.	132.13K - Jl. Gatot Subroto (Ponorogo)	0,63	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
64.	133 - Dengok – Bts Kab Trenggalek	28,07	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
65.	134 - Bts. Kab Ponorogo – Bts Kota Trenggalek	12,95	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
66.	134.11K - Jl. Mayjen Sungkono(Trenggalek)	4,06	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
67.	134.12K - Jl. Yos Sudarso (Trenggalek)	0,70	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional

RUAS JALAN YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI JALAN DAERAH (5)

No	Nama	Panjang	Asal Status Jalan	Perubahan Status Jalan Menjadi			Justifikasi
				Provinsi	Kabupaten	Kota	
68.	134.13K - Jl. P Sudirman (Trenggalek)	0,54	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
69.	134.14K - Jl. Sukarno Hatta (Trenggalek)	1,96	Nasional	Jawa Timur	-	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
70.	121 - Talok – Druju – Sendang Biru	41,98	Nasional	-	Malang	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional
71.	135 - Durenan – Prigi	30,40	Nasional	-	Trenggalek	-	Tidak menghubungkan outlet berskala nasional



5. PENUTUP





PENUTUP

Tindak lanjut setelah pembahasan bersama Pemerintah Daerah:

- Terkait ruas jalan yang **berpotensi** menjadi jalan nasional, Pemda dapat memberikan surat pernyataan:
 - ✓Kesanggupan penyediaan ROW minimal 25 m sebagai upaya persiapan peningkatan kapasitas jalan.
 - ✓Kesanggupan upaya penertiban (penjagaan) tata guna lahan kedua sisi jalan sebagai upaya pencegahan hambatan samping.
 - ✓Adanya penanganan sesuai kewenangan penyelenggaraan jalan (Pemerintah Daerah) selama 5 (lima) tahun terakhir.
- Terkait ruas jalan yang **tidak lagi** berpotensi menjadi jalan nasional, Pemda (Sekda) dapat memberikan surat kesediaan serah terima BMN dari Kementerian PUPR.

CONTOH FORMAT YANG PERLU DISAMPAIKAN

CONTOH FORMAT

LOGO K/L
ATAU
PEMDA

SEKRETARIS DAERAH
(Alamat)
Provinsi

SURAT PERNYATAAN
Nomor: (nomor dan tanggal surat Pemda)

TENTANG
KESEDIAAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DARI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di
..... yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Nomor tanggal
..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah yang berkedudukan di

Menyatakan : Bersedia menerima penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (c.q. Ditjen. Bina Marga), yaitu ruas jalan yang akan berubah
fungsinya tidak lagi menjadi JAP dan JKP-1 dengan rincian sebagaimana terlampir sehingga
tanggung jawab materialis fisik dan administrasi pengelolaan barang akan beralih dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah

Demikian kami sampaikan surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan
kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris D
(Provinsi/ Kabupaten)

DAFTAR RUAS JAP DAN JKP-1 DI PROVINSI JAWA TIMUR YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

NIP	No.	No. Ruas				Nama Ruas	Panjang (km)	Dibangun Oleh	Sumber Dana	No. DIPA	Lokasi	Pemilik Tanah/ Lahan	Sertifikat	Asal		Perubahan	
														Fungsi	Status	Fungsi	Status
	1	020	11	K		JLN. SOEKARNO- HATTA (PILANG - PROBOLINGGO) (PROBOLINGGO)	1,33							A	N		
	2	020	12	K		JLN. P. SUDIRMAN (PILANG - PROBOLINGGO) (PROBOLINGGO)	2,40							A	N		
	3	035	11	K		JLN. GATOT SUBROTO (NGANJUK)	3,66							A	N		
	4	036	11	K		JLN. PANGlima SUDIRMAN (NGANJUK)	2,46							A	N		
	5	036				BTS. KOTA NGANJUK - KERTOSONO	1,09							A	N		

LAMPIRAN SOP DIRJEN BINA MARGA

(SOP/UPM/DJBM-32 DAN SOP/UPM/DJBM-33)

7.3. Ruas Jalan yang Berubah Fungsinya menjadi JAP dan JKP-1 (Ruas Jalan Daerah menjadi Jalan Nasional)

No. Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)	Asal Fungsi Jalan	Asal Status Jalan			Perubahan Fungsi Jalan Menjadi			Perubahan Status Jalan Menjadi	Justifikasi
				Pro vinsi	Kabup aten	Kota	J A P	JKP-1 (non JSN)	JKP-1 (JSN)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Nasional	
										Nasional	

Ket:

⁴ isi dengan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2), Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3), Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), atau Jalan Lingkungan Sekunder (Jling-S)

^{5,6,7,8,9,10} diisi dengan panjang (km)

7.4. Ruas Jalan yang Berubah Fungsinya dari JAP dan JKP-1 (Ruas Jalan Nasional menjadi Jalan Daerah)

No. Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)	Asal Status Jalan	Asal Fungsi Jalan			Perubahan Fungsi Jalan Menjadi	Perubahan Status Jalan Menjadi			Justifikasi
				J A P	JKP-1 (non JSN)	JKP-1 (JSN)		Provin si	Kabup aten	Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Nasional								
			Nasional								

Ket:

⁸ isi dengan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2), Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3), Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), atau Jalan Lingkungan Sekunder (Jling-S)

^{5,6,7,9,10,11} diisi dengan panjang (km)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Diperlukan informasi akurat terkait:

❑ Asal status penyelenggara jalan untuk ruas jalan *upgrade*.

❑ Calon penyelenggara jalan yang baru untuk ruas jalan *downgrade*.

7.2. Ruas Jalan yang Berubah Statusnya menjadi Jalan Nasional

No. Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)	Asal Status Jalan			Perubahan Status Jalan Menjadi	Justifikasi
			Provinsi	Kabupaten	Kota		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Nasional	
						Nasional	

Ket:

^{4,5,6} diisi dengan panjang (km)

7.3. Ruas Jalan yang Berubah Statusnya menjadi Jalan Daerah

No. Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)	Asal Status Jalan	Perubahan Status Jalan Menjadi			Justifikasi
				Provinsi	Kabupaten	Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nasional				
			Nasional				

Ket:

^{5,6,7} diisi dengan panjang (km)



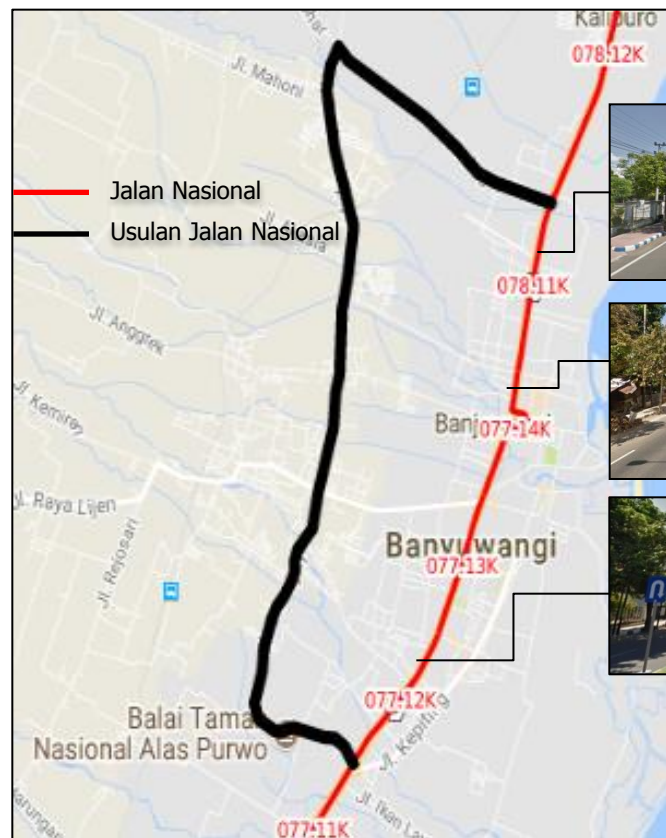
TERIMA KASIH



a. ANALISIS DAN EVALUASI USULAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR



1. USULAN RUAS JALAN ARGOPURO, JALAN RADEN WIJAYA, JALAN HAYAM WURUK, JALAN GAJAH MADA, JALAN BRAWIJAYA, JALAN BRAWIJAYA 3 (KAB. BANYUWANGI) - 9.43 KM



Nama Ruas Usulan	Ruas Jalan Argopuro, Jalan Raden Wijaya, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Brawijaya dan Jalan Brawijaya 3
Total Panjang Usulan	9,43 km
Ruas jalan nasional eksisting	Jalan Basuki Rahmat, Jalan PB Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Adi Sucipto (Nomor Ruas 078 11K – 077 12 K)
Total Panjang jalan nasional eksisting	5,44 km
VCR Jalan Nasional Eksisting	0.192 (IRMS 2018)

Ruas Jalan Argopuro, Jalan Raden Wijaya, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Brawijaya dan Jalan Brawijaya 3 diusulkan menjadi Jalan Nasional untuk menggantikan fungsi Jalan Nasional dengan nomor Ruas 078 11K – 077 12 K

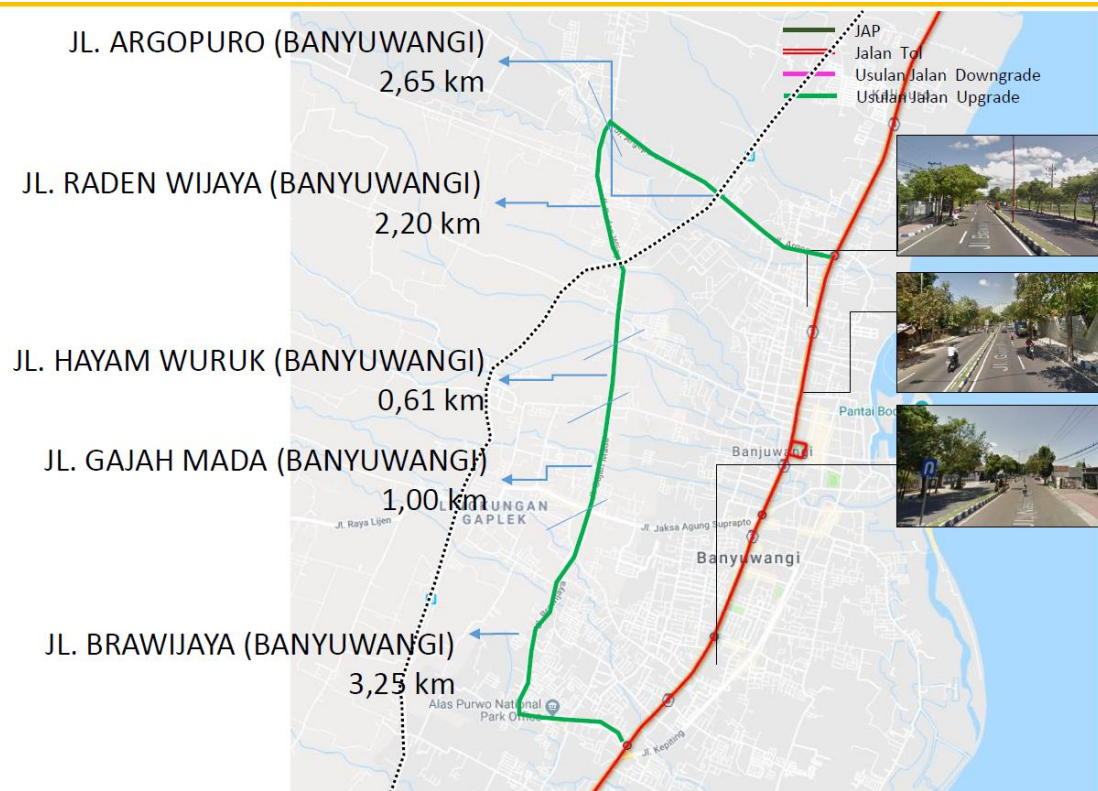
Hasil Telaahan:

1. Ruas jalan nasional eksisting masih dapat memfasilitasi kegiatan di daerah tersebut karena bernilai jauh di bawah titik jenuh, yaitu 0,8.
2. Ruas eksisting nasional tersebut terdiri dari 4 lajur 2 arah serta memiliki median.
3. Sedangkan, ruas jalan usulan tersebut terdiri dari 4 lajur 2 arah kecuali untuk Jalan Argopuro dan Jalan Raden Wijaya yang terdiri dari 2 lajur 2 arah.
4. Tidak ditemukan terminal tipe A, pelabuhan utama/pengumpul, ASDP, dan bandara pengumpul di daerah ruas usulan tersebut.
5. Adanya rambu lalu lintas: kendaraan berat tidak boleh melintasi ruas 077.12K – 078.11K

077.12K Jl. Adi Sucipto	1,40 km
077.13K Jl. A. Yani	1,31 km
077.14K Jl. PB Sudirman	1,19 km
078.11K Jl. Basuki Rahmat	1,54 km

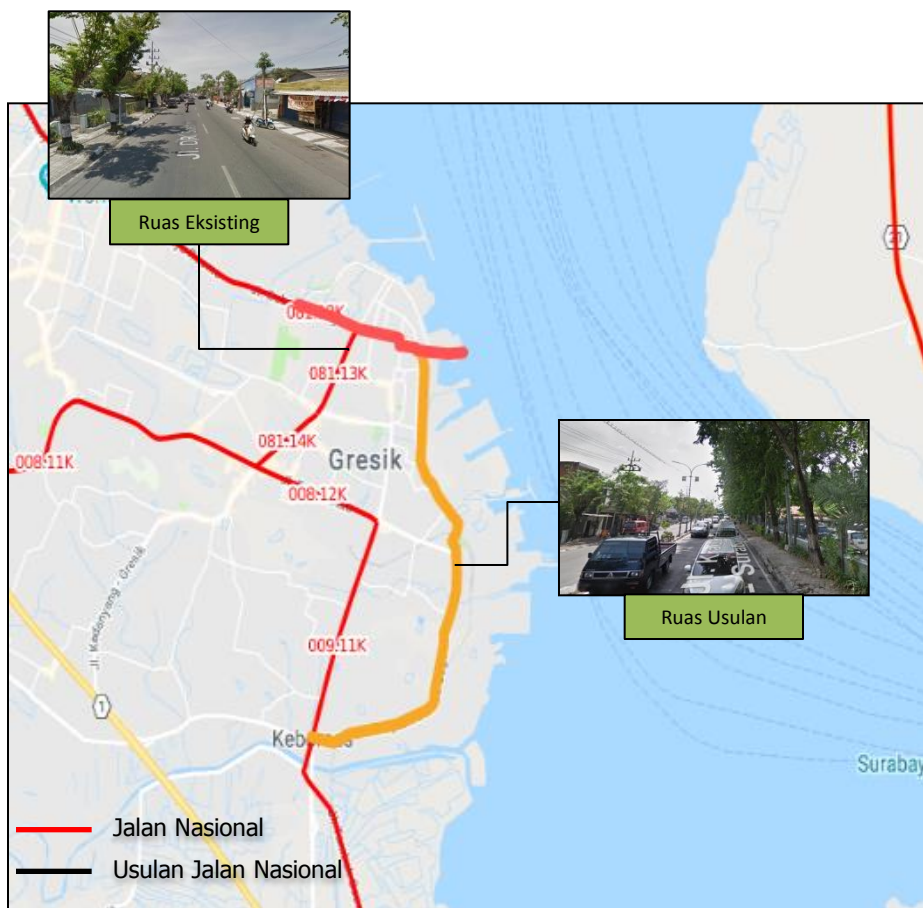
1. USULAN RUAS JALAN ARGOPURO, JALAN RADEN WIJAYA, JALAN HAYAM WURUK, JALAN GAJAH MADA, JALAN BRAWIJAYA, JALAN BRAWIJAYA 3 (KAB. BANYUWANGI) - 9.43 KM(LANJUTAN)

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PANJANG		JENIS LANE	PERKE RASA N	LEBAR JALAN	KILOMETER		KOORDINAT				TITIK REFERENSI		Keterangan	
			SK	HSL SURVEY				STA/ SBY	STA AWAL	STA AHIR	AWAL		AKHIR		AWAL		AKHIR
			KM	KM							X	Y	X	Y			
H		USULAN JALAN LINGKAR BARAT BANYUWANGI		17,440													
1		JL. BRAWIJAYA (BANYUWANGI)		3,250	4L	ASPAL	15 STA	0+000	3+250	S 08°12.916	E 114°21.289	S 08°14.181	E 114°21.486	SP 4 Jl. Brawijaya, Jl. Gajah Mada, Jl. Jagung Suprpto, Jl. Cokro Aminoto	SP 4 Jl. Brawijaya, Jl. Kepiting, Kantor PJR Banyuwangi, SPBU		
2		JL. GAJAH MADA (BANYUWANGI)		1,000	4L	ASPAL	13,5 STA	0+000	1+000	S 08°12.334	E 114°21.410	S 08°12.916	E 114°21.289	S4 Hayam Wuruk - Gajahmada	SP 4 Jl. Brawijaya, Jl. Gajah Mada, Jl. Jagung Suprpto, Jl. Cokro Aminoto		
3		JL. HAYAM WURUK (BANYUWANGI)		0,610	2L	ASPAL	7 STA	0+000	0+610	S 08°11.991	E 114°21.433	S 08°12.334	E 114°21.410	S3 Husni Tamrin - Hayam Wuruk - Raden wijaya	S4 Hayam Wuruk - Gajahmada		
4		JL. RADEN WIJAYA (BANYUWANGI)		2,200	2L	ASPAL	9 STA	0+000	2+200	S 08°10.831	E 114°21.402	S 08°11.991	E 114°21.433	S3 Argopuro - Radenwijaya	S3 Husni Tamrin - Hayam Wuruk - Raden wijaya	ADA SIMPANG SEBIDANG KA S 08°11.595 E 114°21.468	
5		JL. ARGOPURO (BANYUWANGI)		2,650	2L	ASPAL	10 STA	0+000	2+650	S 08°11.551	E 114°22.595	S 08°10.831	E 114°21.402	S3 Basuki rahmad - Jl Argopuro	S3 Argopuro - Radenwijaya	ADA SIMPANG SEBIDANG KA S 08°11.227 E 114°21.990	



Kesimpulan:
 Usulan ruas jalan tersebut **belum berpotensi menjadi jalan nasional** karena belum memenuhi kriteria teknis ROW minimal 25 m dan tata guna lahan disepanjang usulan ruas sudah padat dengan kawasan pertokoan dan pemukiman sehingga sulit untuk pengembangan jaringan jalan ke depannya.

2. USULAN RUAS JL. HARUN THOHIR (GRESIK-SIDORUKUN), JL.KAPTEN DARMO SUGONDO (SEGOROMADU-SIDORUKUN), JL. YOS SUDARSO, JL.RE MARTADHINATA (ROOMO- PELABUHAN GRESIK), JL.AMAK KHASIM



Kesimpulan:

Usulan **ruas Jl RE Martadhinata berpotensi menjadi jalan nasional karena akses ke Pelabuhan Gresik**, sedangkan usulan ruas lainnya belum berpotensi menjadi jalan nasional karena belum memenuhi kriteria teknis ROW minimal 25 m.

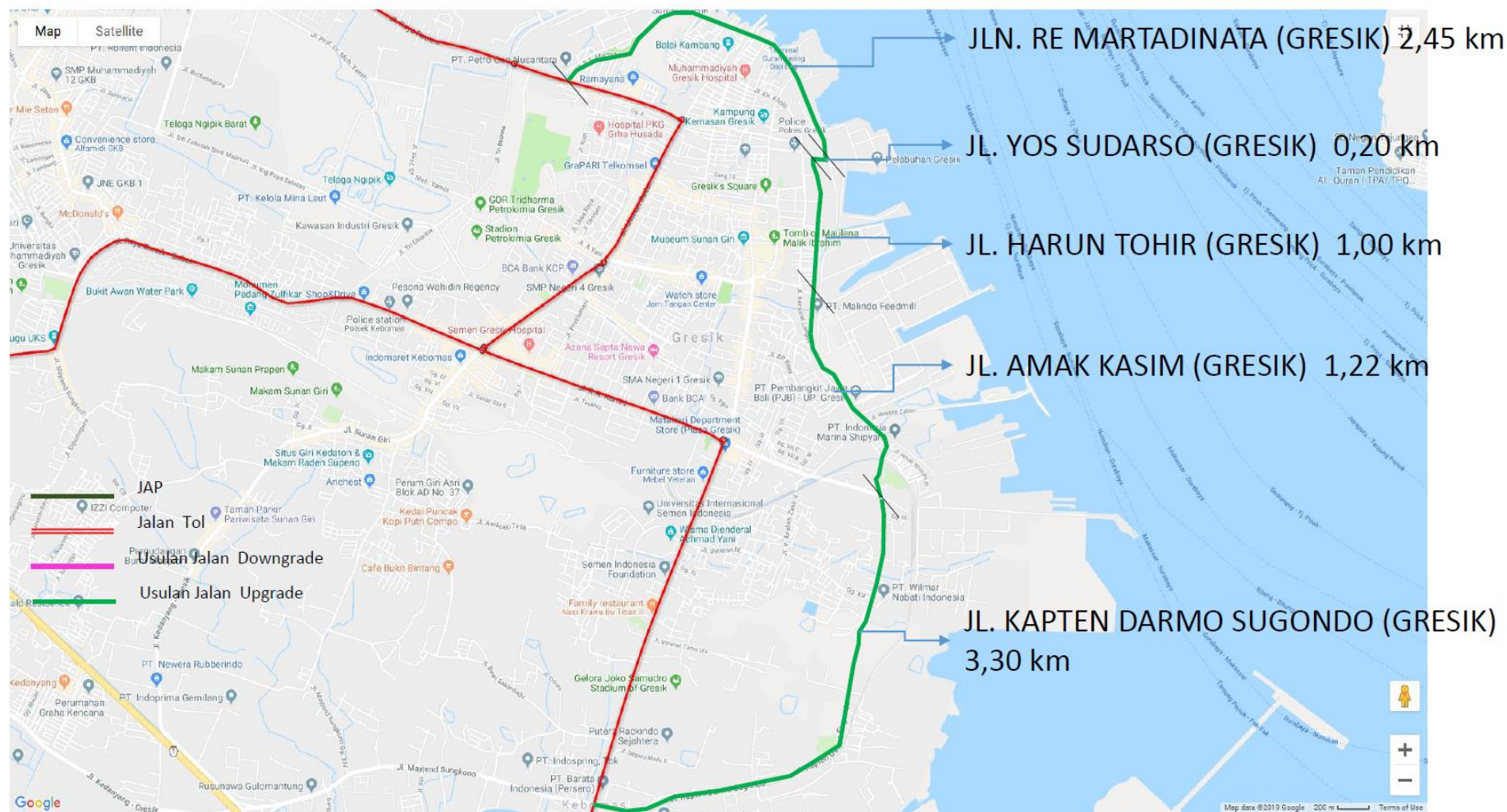
Nama Ruas Usulan	Jl. Harun Thohir (Gresik – Sidorukun), Jl. Kapten Darmo Sugondo (Segoromadu – Sidorukun), Jl. Yos Sudarso, Jl. RE Martadhinata (Roomo – Pelabuhan Gresik), Jl. Amak Khasim
Total Panjang Usulan	7,85 km
Ruas jalan nasional eksisting	Jl. Dr. Soetomo, Jl. Usman Sadar, Jl. Gubernur Suryo (Gresik) ruas 081 12K – 081 14K
Total Panjang jalan nasional eksisting	2,80 km
VCR Jalan Nasional Eksisting	0,71 (IRMS 2018)

Ruas usulan, diusulkan menjadi Jalan Nasional karena intensitas kendaraan melebihi tonase yang mampu diakomodir jalan kabupaten. Sedangkan, penurunan jalan nasional eksisting diusulkan sebagai tukar guling dengan usulan perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan nasional.

Hasil Telaahan:

1. Terdapat Pelabuhan Gresik yang perlu difasilitasi oleh Jalan Nasional (Jl. RE Martadhinata)
2. Dilihat dari sistem jaringan, sudah terdapat jalan nasional yang memfasilitasi daerah tersebut.
3. Lebar ruas Jl. Harun Thohir 7 m dengan tata guna lahan pemukiman dan pertokoan, selain ini diawal dan akhir ruas jalan terdapat portal beton permanen.
4. Lebar ruas jalan Amak Kasim 7 m dengan tata guna lahan kawasan industri, serta terdapat viaduct pada STA 0+900.
5. Lebar ruas jalan Kapt. Darmo Sugondo 7 m dengan tata guna lahan kawasan industri dan pertokoan.

2. USULAN RUAS JL. HARUN THOHIR (GRESIK-SIDORUKUN), JL.KAPTEN DARMO SUGONDO (SEGOROMADU-SIDORUKUN), JL. YOS SUDARSO, JL.RE MARTADHINATA (ROOMO- PELABUHAN GRESIK), JL.AMAK KHASIM



3. USULAN JALAN LINGKAR MOJOAGUNG (KAB. JOMBANG) - 5.10 KM



Hasil Telaahan:

1. Ruas jalan Lingkar Mojoagung (lebar rata-rata 15 m) merupakan alternatif dari ruas jalan nasional eksisting 039. Bts Kota Jombang – Bts Kab Mojokerto yang mana volume lalu lintas hariannya tinggi dan fungsi jalan arteri pada kota tersebut sudah kurang optimal.
2. Ruas Jalan Lingkar Mojoagung belum tuntas pembangunannya secara keseluruhan karena perlu adanya perbaikan geometri jalan untuk laik fungsi jalan.
3. Ruas Jalan Lingkar Mojoagung diusulkan penanganannya melalui Renstra 2020-2024, setelah selesai pembangunan jalan tersebut dan fungsional maka akan ditingkatkan status jalannya menjadi jalan nasional.
4. Ruas Jalan Lingkar Mojoagung **berpotensi menjadi jalan nasional** dan **jalan nasional eksisting yang melalui kota Mojoagung diusulkan untuk diserahkan kepada Pemkab Jombang.**

4. RUAS JALAN LINGKAR BARAT KEPANJEN, TALANGAGUNG – NGANJUM (KAB.MALANG) – 5,75 KM



Ruas Usulan



Ruas Eksisting

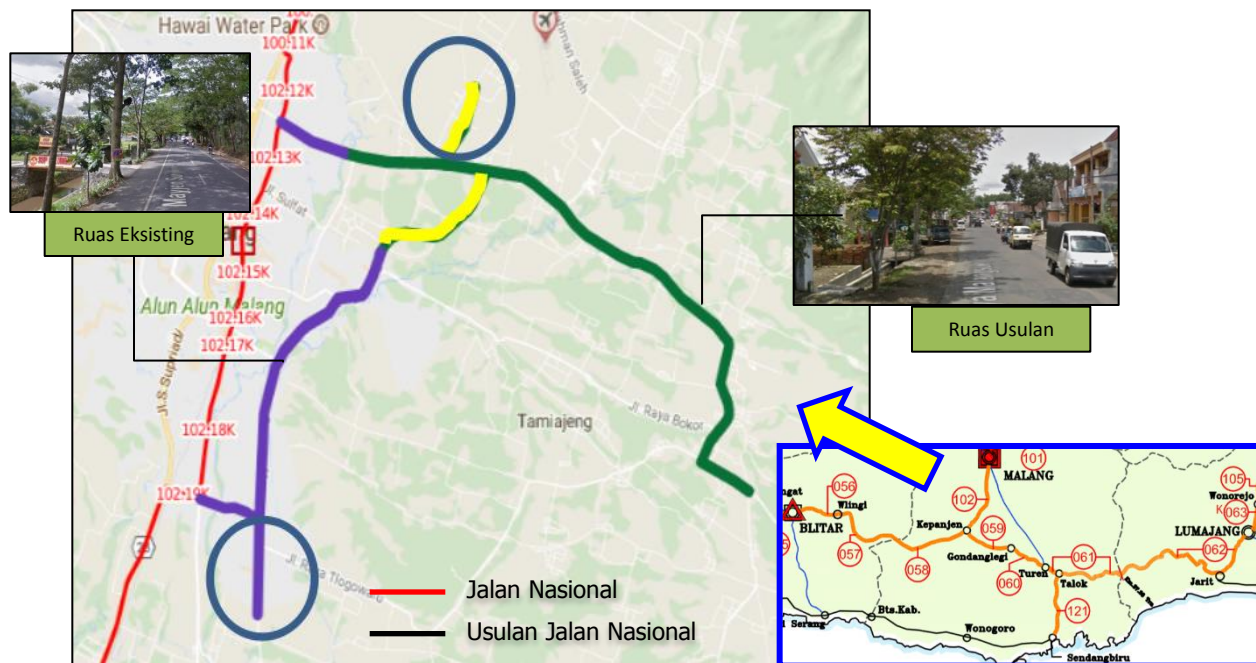


Nama Ruas Usulan	Jalan Lingkar Barat Kepanjen, Talangagung – Nganjum
Total Panjang Usulan	5,75 km
Ruas jalan nasional eksisting	Ruas Jalan Lingkar Barat Kepanjen (Ruas asal : Bts. Kota Malang – Kepanjen) dan penurunan Ruas 102 (Malang)
Total Panjang jalan nasional eksisting	13,26 km
Ruas usulan, diusulkan menjadi jalan nasional karena merupakan bypass Jalan Nasional Blitar – Malang	

Hasil Telaahan:

1. Kondisi jalan nasional eksisting sulit untuk dilakukan pelebaran karena keterbatasan lahan dan tata guna lahan sepanjang ruas jalan yang padat terdiri dari kawasan komersil.
2. Hasil survei lapangan panjang ruas jalan Lingkar Barat Kepanjen 5,75 km terdiri dari 3,6 km 4L (lebar 13,6 m) dan 2,15 km 2L (lebar 7,2 m).
3. Ruas Jalan Lingkar Barat Kepanjen **berpotensi menjadi jalan nasional dengan catatan Pemerintah Daerah menyediakan ROW minimal 25 m** untuk pelebaran jalan sepanjang 2,15 km, sedangkan ruas jalan nasional eksisting (102 Bts Kota Malang – Kepanjen) berkurang 4,16 km dan **diusulkan akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang.**

5, 6, 12. USULAN RUAS MANGLIAWAN (BATAS KOTA MALANG) – TUMPANG, TUMPANG – TULUSBESAR (RUAS ASAI: TUMPANG – WONOMULYO), ASRIKATON – BANDARA ABDUL RAHMAN SALEH, SEKARPURO – BUNUT, JALAN LA. SUCIPTO, JALAN KI AGENG GRIBIG, JALAN MAYJEND SUNKONO, JALAN RAJASA, JALAN RAYA GADANG



Nama Ruas Usulan	Ruas Mangliawan (Batas Kota Malang) – Tumpang, Tumpang – Tulusbesar (Ruas Asai: Tumpang – Wonomulyo), Asrikaton – Bandara Abdul Rahman Saleh, Sekarpuro – Bunut, Jalan LA. Sucipto, Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Mayjend Sungkono, Jalan Rajasa, Jalan Raya Gadang (Kab. Malang dan Kab. Tulungagung)
Total Panjang Usulan	34.43 km
Ruas jalan nasional eksisting	Ruas 122 (Lawean-Sukapura), ruas 102.13K-102.18K

Hasil Telaahan:

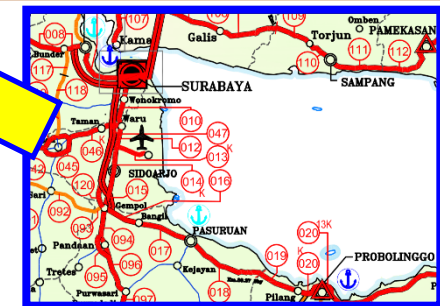
1. Ruas hijau diusulkan sebagai penunjang KSPN Bromo-Tengger-Semeru. Berdasarkan sistem jaringan jalan nasional, akses KSPN Bromo-Tengger-Semeru **telah difasilitasi oleh jalan nasional** Lawean – Sukapura.
2. Ruas kuning bagian atas diusulkan menjadi jalan nasional untuk memfasilitasi akses tol sekaligus memfasilitasi Bandara Abdul Rachman Saleh. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 69 Tahun 2013 Tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional, Bandara Abdul Rachman Saleh termasuk bandara pengumpan sehingga **belum memenuhi kriteria untuk difasilitasi jalan nasional**.
3. Terdapat ruas kuning bagian bawah dan ungu yang diusulkan tukar guling dengan ruas 102.13K-102.18K. VCR ruas jalan nasional eksisting berkurang dengan beroperasinya Jalan Tol Pandaaan – Malang sehingga usulan ruas tersebut **belum berpotensi menjadi jalan nasional**.
4. Ruas yang dilingkari **belum berpotensi untuk menjadi jalan nasional** karena tidak menghubungkan tempat kegiatan strategis berskala nasional.

7. USULAN RUAS LINGKAR LUAR TIMUR SIDOARJO (CANDI – PRASUNG DAN PRASUNG – BANJARKEMANTREN) (KAB. SIDOARJO) - 10.90 KM



Nama Ruas Usulan	Lingkar Luar Timur Sidoarjo (Candi – Prasung dan Prasung – Banjarkemantren) (Kab. Sidoarjo)
Total Panjang Usulan	10,90 km
Ruas jalan nasional eksisting	Ruas 012.11K-15K; 015.11K-15K; dan 014.11K

Ruas usulan diajukan sebagai Jalan Penghubung antar Kab/Kota (Surabaya – Malang).



Hasil Telaahan:

- Hasil survei lapangan bahwa ruas jalan Lingkar Timur Sidoarjo panjangnya 10,8 Km terdiri dari 3,71 km 4L (lebar 14 m) dan 7,19 km 2L (lebar 7 m) dengan tata guna lahan bervariasi ada pertokoan, kawasan industri dan pertanian.
- Ruas jalan Lingkar Timur Sidoarjo **berpotensi menjadi jalan nasional** dengan catatan Pemerintah Daerah diminta menyediakan ROW minimal 25 m untuk pengembangan jaringan ruas jalan tersebut ke depannya.

Catatan: terdapat 5 ruas jalan yang harus di-downgrade namun belum tercantum dalam Berita Acara:

014.11K Jln. Layang Sidoarjo
015.11K Jln. Gatot Subroto (Sidoarjo)
015.12K Jln. Sunandar P. Sudarmo (Sidoarjo)
015.13K Jln. Diponegoro (Sidoarjo)
015.14K Jln. Thamrin (Sidoarjo)

8. USULAN RUAS ARYA WIRARAJA DAN TURUN STATUS RUAS JL. DR. SOETOMO, JL. USMAN SADAR, JL. GUBERNUR SURYO (KAB. SUMENEP) - 2.9 KM



Nama Ruas Usulan	Ruas Arya Wiraraja dan Turun Status Ruas Jl. Dr. Soetomo, Jl. Usman Sadar, Jl. Gubernur Suryo (Kab. Sumenep)
Total Panjang Usulan	2,9 km
Ruas jalan nasional eksisting	ruas 115.11K dan 12K
Total Panjang jalan nasional eksisting	2,8 km.

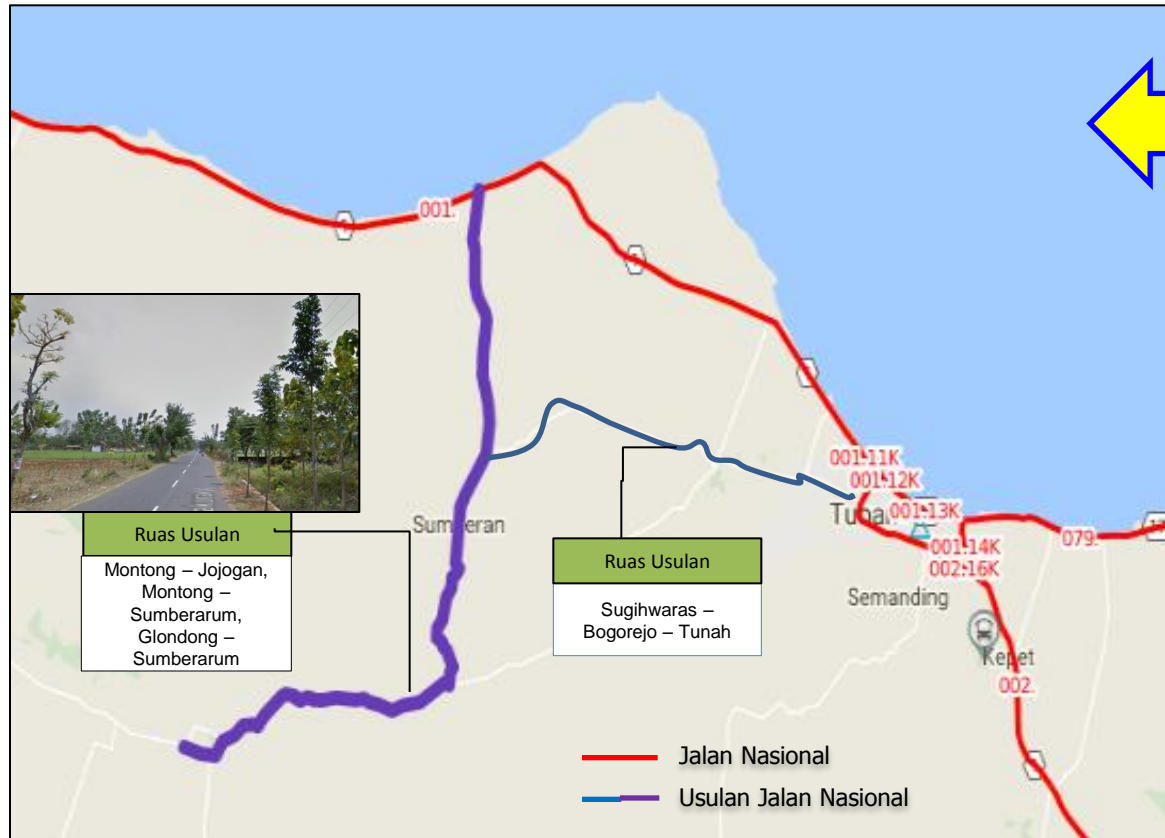
Ruas usulan diajukan sebagai Akses Pelabuhan Kalianget dan Bandara Trunojoyo.

Hasil Telaahan:

1. Pelabuhan Kalianget termasuk Pelabuhan Regional Pengumpan (KP No. 432 Tahun 2017) **sehingga tidak memenuhi kriteria administrasi menjadi jalan nasional.**
2. Bandara Trunojoyo termasuk Bandara Pengumpan (PM No. 69 Tahun 2013).
3. Menurut IRMS 2018, VCR maksimum di ruas 115.11K dan 12K adalah 0,35. Sehingga, untuk ruas ini dapat disimpulkan **belum berpotensi menjadi jalan nasional** karena tidak menghubungkan pusat kegiatan strategis yang berskala nasional.



9, 10. USULAN RUAS MONTONG – JOJOGAN, MONTONG – SUMBERARUM, GLONDONG – SUMBERARUM, SUGIHWARAS – BOGOREJO – TUNAH (KAB. TUBAN)



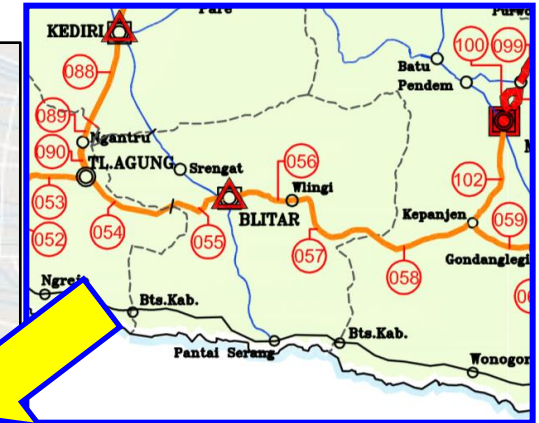
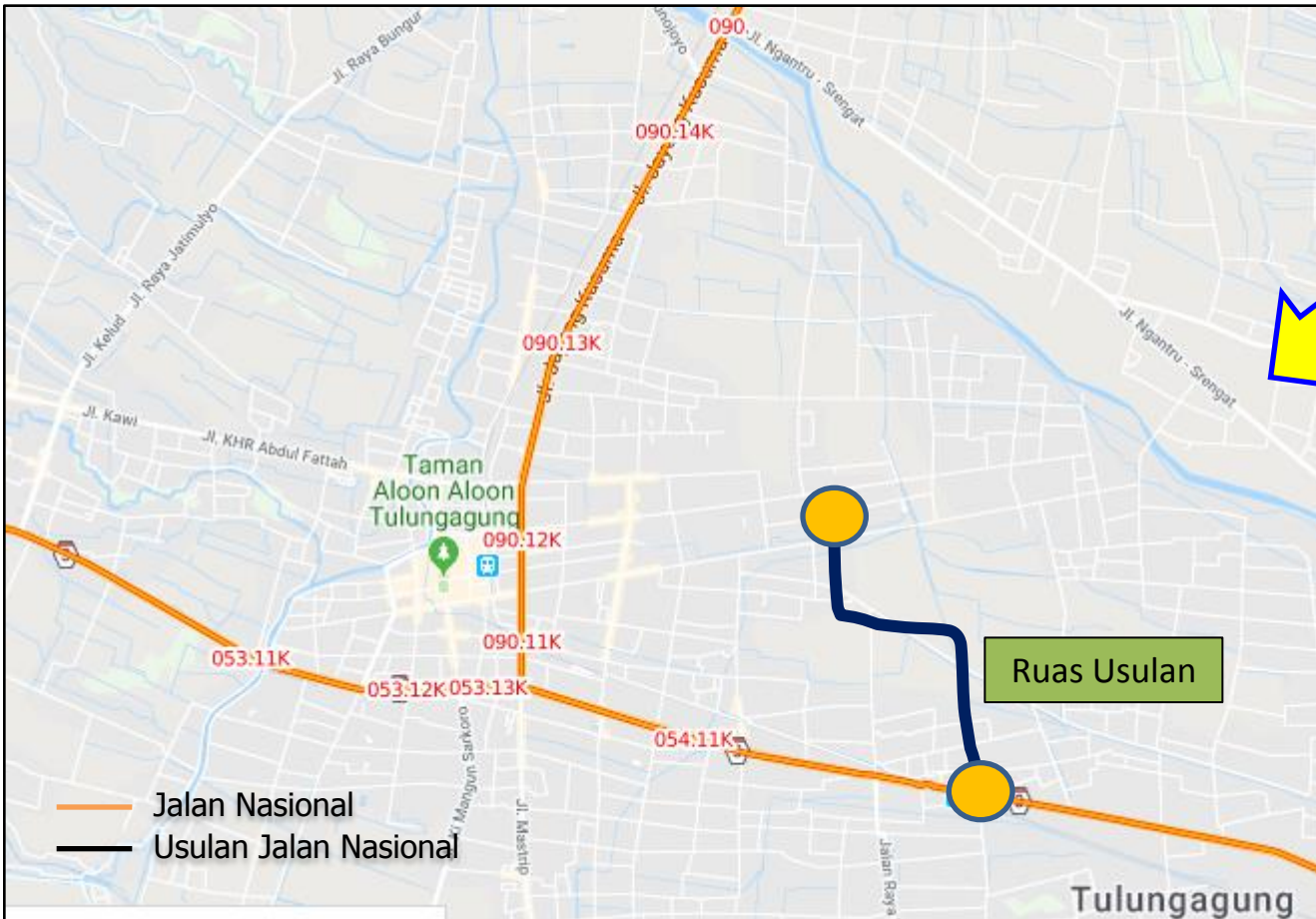
Nama Ruas Usulan	Montong – Jojogan, Montong – Sumberarum, Glondong – Sumberarum, Sugihwaras – Bogorejo – Tunah (Kab. Tuban)
Total Panjang Usulan	48,02 km

Ruas ungu diusulkan sebagai akses menuju industri semen dan membuka akses industri migas, sedangkan ruas biru diperuntukan mengurai kemacetan lalu lintas dan sebagai pengembangan perkotaan Tuban.

Hasil Telaahan:

1. Ruas Montong – Jojogan, Montong – Sumberarum, Glondong – Sumberarum tidak mengakses pusat kegiatan berskala nasional sehingga **belum berpotensi menjadi jalan nasional**.
2. Ruas Sugihwaras – Bogorejo – Tunah tidak mengakses pusat kegiatan berskala nasional sehingga **belum berpotensi menjadi jalan nasional**.

11. RUAS PULOSARI – BUKUR (KAB. TULUNGAGUNG) - 5.59 KM



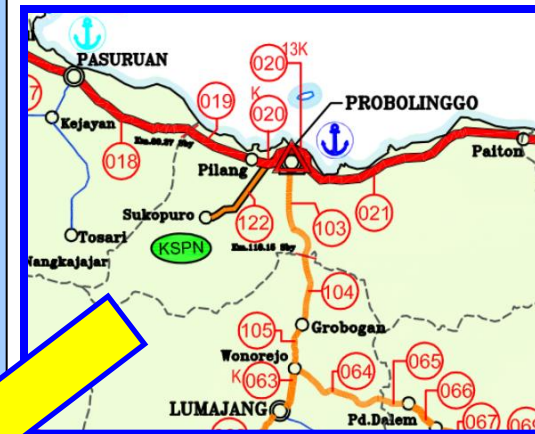
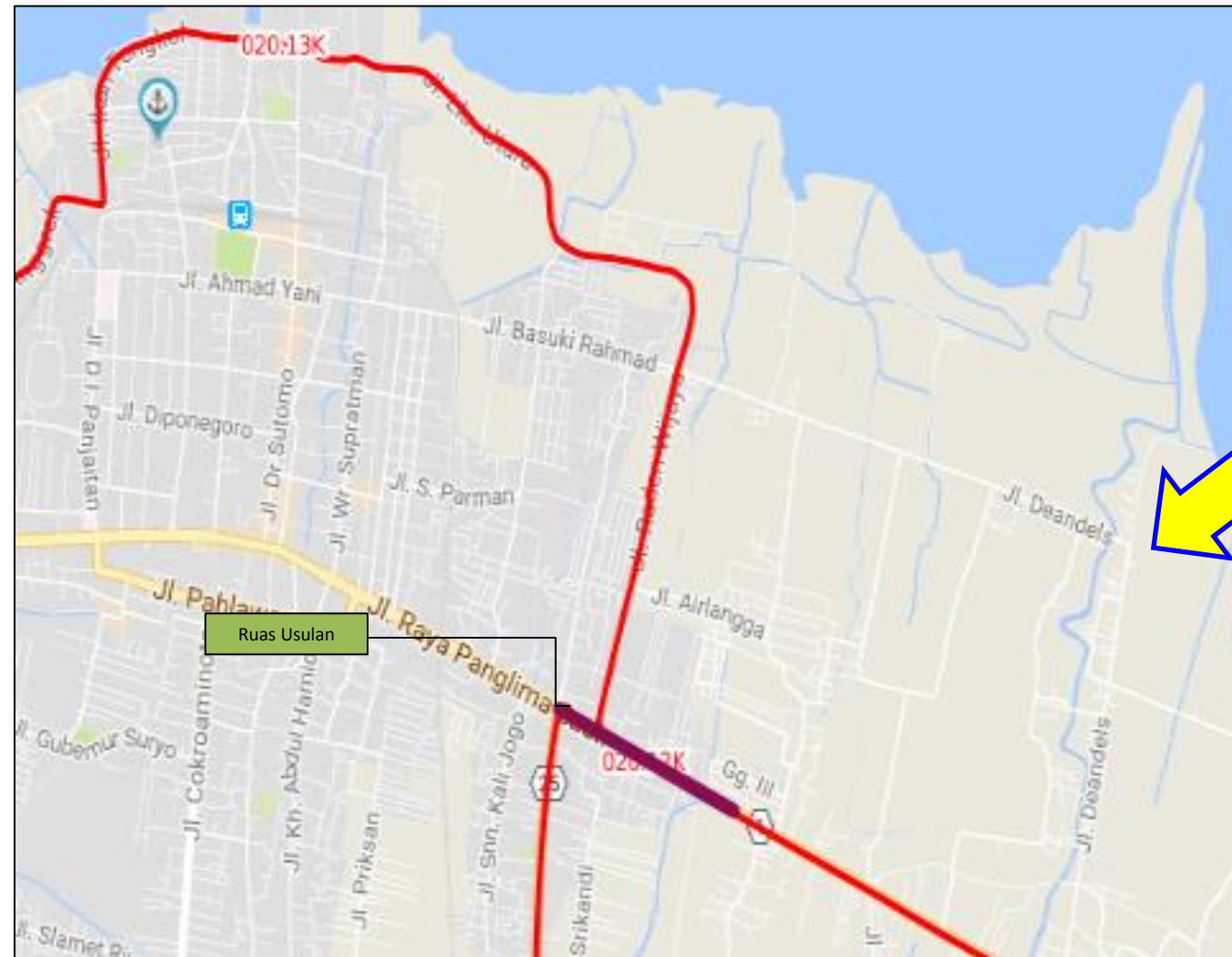
Nama Ruas Usulan	Ruas Pulosari – Bukur (Kab. Tulungagung)
Total Panjang Usulan	5,59 km
Ruas jalan nasional eksisting	Ruas 054.11K, 090.11K-14K

Ruas usulan di ajukan sebagai jalan lingkaran timur Tulungagung yang menghubungkan Jalan Nasional dengan Jalan Provinsi.

Hasil Telaahan:

- Usulan ruas jalan tidak mengakses pusat kegiatan yang berskala nasional.
- Selain itu, usulan ruas jalan tidak menerus, sehingga usulan jalan nasional ini **belum berpotensi menjadi jalan nasional.**

13. USULAN RUAS PANGLIMA SUDIRMAN (KOTA PROBOLINGGO) - 0.3 KM



Nama Ruas Usulan	Ruas Jalan Panglima Sudirman
Total Panjang Usulan	0,3 km

Ruas sepanjang 0,3 km diusulkan menjadi jalan nasional agar jaringan jalan nasional tidak terputus.

Hasil Telaahan:

Terdapat ruas jalan nasional missing link (020 12K - JLN. P. SUDIRMAN (PILANG - PROBOLINGGO) (PROBOLINGGO) sepanjang 300 m, **sehingga perlu penambahan panjang ruas dalam SK Menteri PUPR yang semula 0,61 km akan menjadi 0,91 km.**

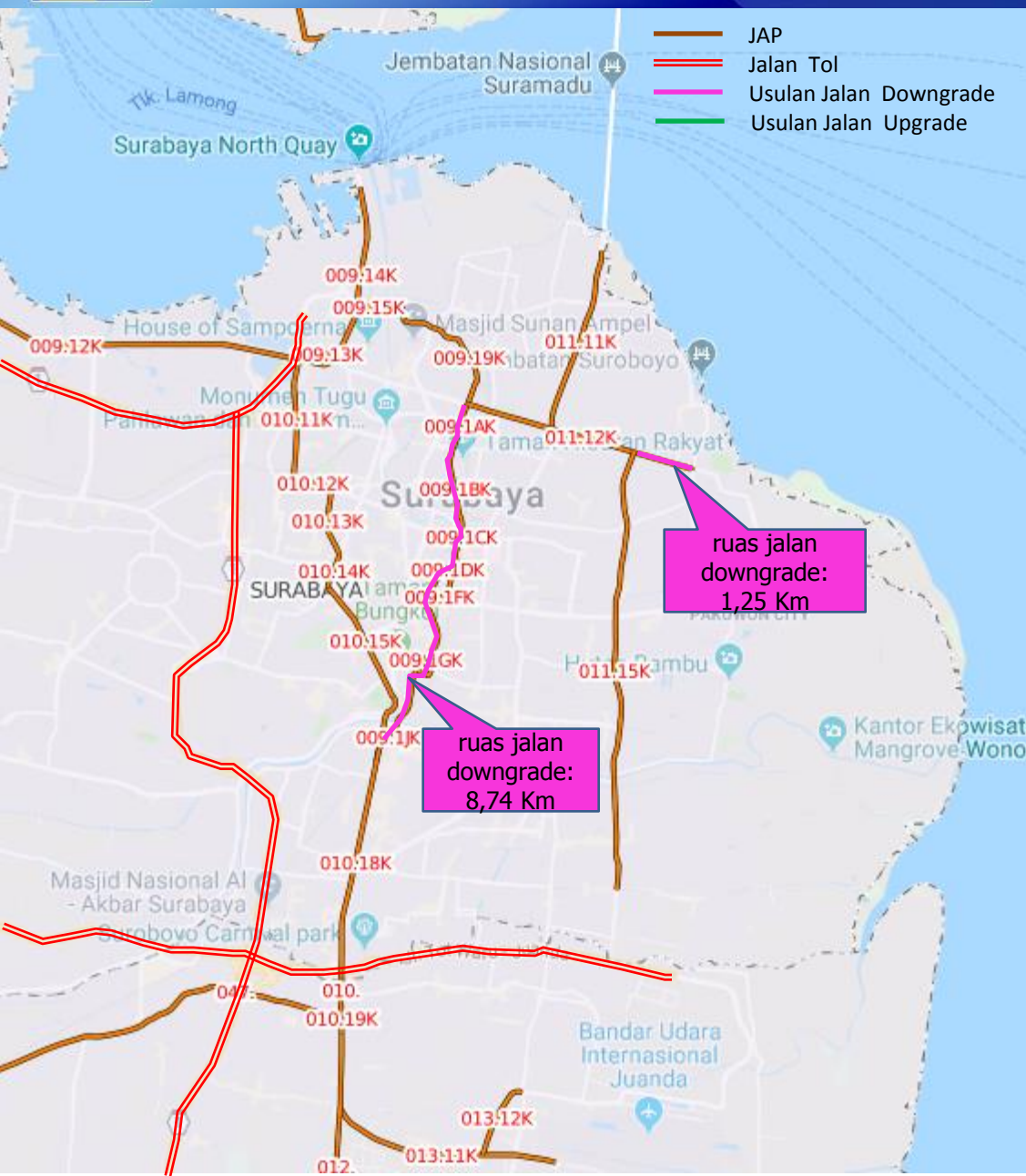


b. ANALISIS TAMBAHAN





1. Dalam Kota Surabaya (9,99 Km)



- ❑ Ruas jalan 009.1AK-009.1JK merupakan ruas jalan nasional dalam kota Surabaya sehingga peranan fungsi jalan arteri primer berubah. Selain itu peningkatan kapasitas jalan pada ruas tersebut sulit dilaksanakan karena tata guna lahan, daerah perkantoran, dan padat pemukiman penduduk.
- ❑ Pengurangan panjang ruas no 011.12K sepanjang 1,25 Km karena tidak menghubungkan terhadap pusat kegiatan berskala nasional.
- ❑ Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruas jalan 009.1AK-009.1JK dan ruas jalan 011.12K sepanjang 1,25 Km diusulkan untuk berubah fungsi dan turun statusnya serta diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Ruas jalan yang downgrade:

009.1AK Jl. Kapasari	0,89 Km
009.1BK Jl. Kusuma Bangsa	1,72 Km
009.1CK Jl. Gubeng Stasiun	0,26 Km
009.1DK Jl. Raya Gubeng	0,52 Km
009.1EK Jl. Biliton	0,70 Km
009.1FK Jl. Sulawesi	0,49 Km
009.1GK Jl. Raya Ngagel	3,00 Km
009.1HK Jl. Kencana/B. Tomo	0,23 Km
009.1IK Jl. Ratna/Upajiwa	0,39 Km
009.1JK Jl. Wonokromo	0,54 Km
Stasiun	
011.12K Jl. Kenjeran	<u>1,25 Km</u>
	9,99 Km



2. Akses Suramadu Sisi Madura (17,44 Km)



1. Jalan dan Jembatan Suramadu
Panjang: 6,1 km
Lebar jalan: 4L 27,5 m

2. Jalan Akses Suramadu
Panjang: 11,34 km
Lebar jalan: 4L 14 m

Kedua ruas diatas berpotensi menjadi jalan nasional karena terdapat Jembatan Suramadu yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Kab. Bangkalan (Pulau Madura).



2 Akses Suramadu Sisi Madura dan Jalan Suramadu



TITIK AWAL SURAMADU
6,10 KM



TITIK AWAL SURAMADU
6,10 KM



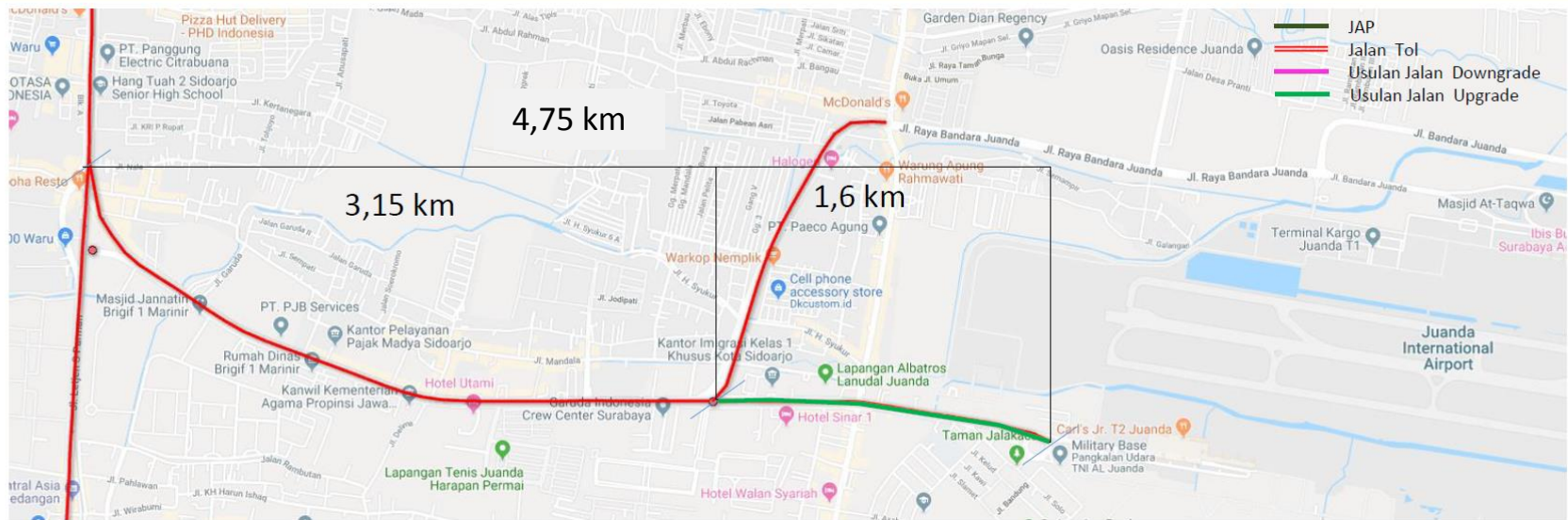
TITIK AWAL AKSES SURAMADU
SISI MADURA
11,34 KM



TITIK AKHIR AKSES SURAMADU
SISI MADURA
11,34 KM

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PANJANG		JENIS LANE	PERKE RASA N	LEBAR JALAN	KILOMETER			KOORDINAT			
			SK	HSL SURVEY				STA/ SBY	STA AWAL	STA AHIR	AWAL		AKHIR	
			KM	KM							X	Y	X	Y
1		PEMUTAKHIRAN RUAS KOTA SURABAYA		17,440										
2	011.11	JLN. KEDUNG COWEK (SURABAYA)/ AKSES SURAMADU SISI SURABAYA	3,880	3,880	4L	RIGID	21	STA	0+000	3+880	-7,245083333	112,7687778	-7,212083333	112,7782778
3		JALAN SURAMADU		6,100	4L	ASPAL DAN RIGID	27,5	STA	0+000	6+100	S 07°12.724	E 112°46.706	S 07°09.444	E 112°46.923
4		JLN. AKSES SURAMADU SISI MADURA (BANGKALAN)		11,340	4L	ASPAL	14	STA	0+000	11+340	S 07°09.444	E 112°46.923	S 07°03.526	E 112°47.708

3. Jalan Akses Bandara Juanda (1,60 Km)



NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PANJANG		JENIS LANE	PERKE RASA N	LEBAR JALAN	KILOMETER			KOORDINAT				TITIK REFERENSI		Keterangan
			SK	HSL SURVEY				STA/ SBY	STA AWAL	STA AHIR	AWAL		AKHIR		AWAL	AKHIR	
			KM	KM							X	Y	X	Y			
				17,440													
D		PEMUTAHIRAN JL. AKSES BANDARA JUANDA															
1	013.11	JLN. AKSES BANDARA JUANDA (SIDOARJO)	3,150	4,900	4L	ASPAL	14	SBY	14+450	17+600	S 07°22.358	E 112°43.749	S 07°22.957	E 112°46.203	SP 3. Aloha, Akses Bandata	Bunderan Bandara T2	Panjang Lap. 4.9 Menurut SK. 3.3 bertambah 1.6

Terdapat *missing link* pada ruas 013 11K - Jalan Akses Bandara Juanda (Sidoarjo) sepanjang 1,6 km sehingga panjang dalam SK Menteri PUPR No.248/2015 yang semula 3,15 km maka diusulkan berubah menjadi 4,75 km.

4. Jalan Nasional Paralel di Kab. Sidoarjo (7,53 Km)



- ❑ Ruas jalan 015 diusulkan pengurangan panjang 3,93 Km karena terkena dampak lumpur Lapindo.
- ❑ Ruas 016 diusulkan pengurangan panjang 2,85 km dan ruas 094 juga pengurangan panjang 0,75 km
- ❑ Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruas jalan 015 diusulkan pengurangan panjang 3,93 Km untuk berubah fungsi dan statusnya serta diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sedangkan ruas jalan 016 dan 094 pengurangan panjang sepanjang 3,60 km yang berubah fungsi dan statusnya akan diserahkan kepada Pemkab Pasuruan.

Ruas jalan Gempol Bypass diusulkan untuk alih fungsi dan upgrade statusnya menjadi Jalan Nasional karena ruas jalan tersebut sebagai jalur kendaraan berat.



Ruas jalan yang downgrade:

015 Bts Kota Sidoarjo – Gempol	3,93 Km
016 Gempol – Bts Kota Bangil	2,85 Km
094 Gempol – Pandaan	0,75 Km
	7,53 Km

5. Jalan Nasional Paralel di Kota Ngawi (9,79 Km)

Ruas 027.11

Kendaraan Berat (smp/hari):
Gol 6 : 6078
Gol 7 : 1918
VCR : 0,38
AADT(smp/hari) : 30378
Lebar rata – rata : 12,7 m



Ruas 032.12

Kendaraan Berat (smp/hari):
Gol 6 : 1446
Gol 7 : 404
VCR : 0,39
AADT(smp/hari) : 14761
Lebar rata – rata : 8,79 m

Ruas 028.11

Kendaraan Berat (smp/hari):
Gol 6 : 3909
Gol 7 : 364
VCR : 0,28
AADT(smp/hari) : 15280
Lebar rata – rata : 12,7 m

— Jalan Arteri Primer
— Jalan Tol
— Usulan Jalan Downgrade

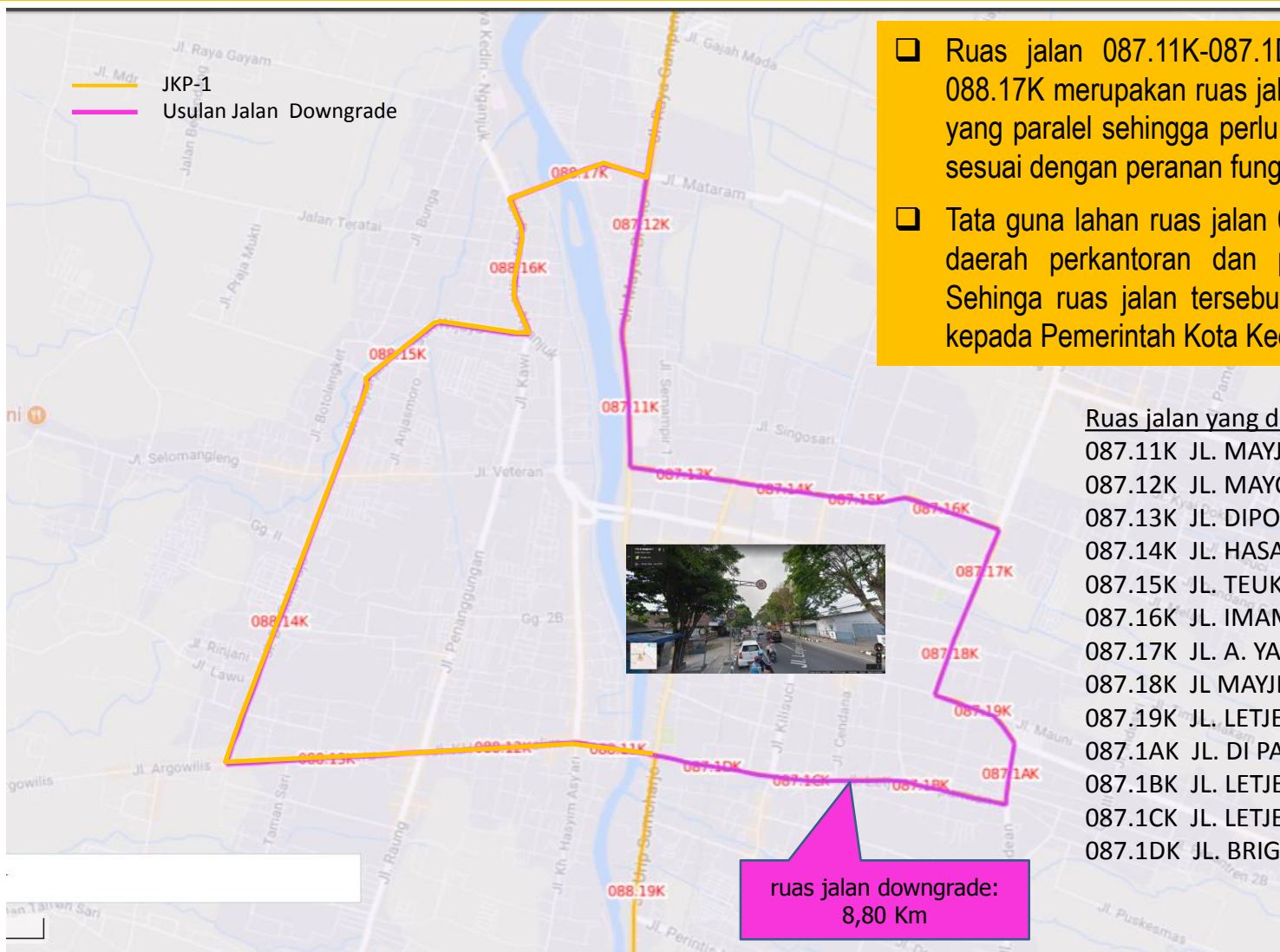
Ruas jalan yang downgrade:

027.11K Jl. Gubernur Suryo (Ngawi)	1,46 Km
027.12K Jl. P.B Sudirman (Ngawi)	1,44 Km
028.11K Jl. A. Yani (Ngawi)	2,00 Km
032.11K Jl. Basuki Rahmat (Ngawi)	1,68 Km
032.12K Jl. Sukowati (Ngawi)	1,81 Km
031.13K Jl. Soekarno – Hatta	1,40 Km
	9,79 Km

❑ Ruas jalan 027.11K, 027.12K, 032.11K, 032.12K merupakan ruas jalan nasional melalui kawasan perkotaan Ngawi sehingga peranan fungsi jalan arteri primer berubah. Selain itu, peningkatan kapasitas jalan pada ruas tersebut sulit dilaksanakan karena tata guna lahan, daerah perkantoran, dan padat pemukiman penduduk.

❑ Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruas jalan tersebut diusulkan untuk alih fungsi dan turun status serta diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi.

6. Jalan Nasional Dalam Kota Kediri (8,56 Km)



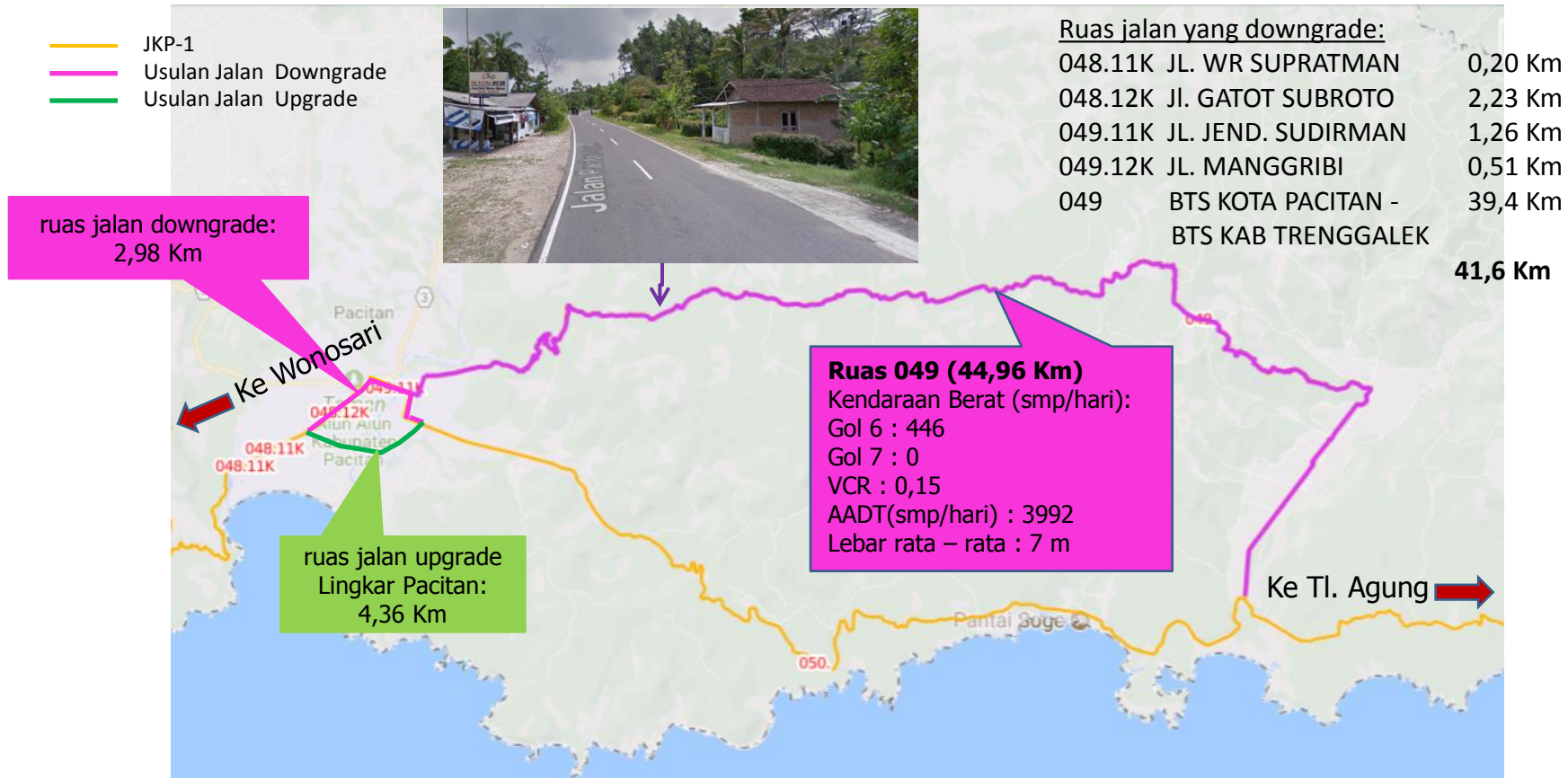
- ❑ Ruas jalan 087.11K-087.1DK dan ruas jalan 088.11K-088.17K merupakan ruas jalan nasional melalui kota Kediri yang paralel sehingga perlu untuk memilih ruas jalan yang sesuai dengan peranan fungsi jalan kolektor primer-1.
- ❑ Tata guna lahan ruas jalan 087.11K-087.1DK berada pada daerah perkantoran dan padat pemukiman penduduk. Sehingga ruas jalan tersebut diusulkan untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Kediri.

Ruas jalan yang downgrade:

087.11K JL. MAYJEN SUNKONO	0,78 Km
087.12K JL. MAYOR BISMO	1,12 Km
087.13K JL. DIPONEGORO	0,74 Km
087.14K JL. HASANUDDIN	0,62 Km
087.15K JL. TEUKU UMAR	0,34 Km
087.16K JL. IMAM BONJOL	0,81 Km
087.17K JL. A. YANI	0,57 Km
087.18K JL MAYJEN SUPRAPTO	0,58 Km
087.19K JL. LETJEN SUTOYO	0,65 Km
087.1AK JL. DI PANJAITAN	0,37 Km
087.1BK JL. LETJEN S PARMAN	1,17 Km
087.1CK JL. LETJEN MT HARYONO	0,44 Km
087.1DK JL. BRIGJEN KATAMSO	<u>0,61 Km</u>
	8,56 Km



7. Jalan Nasional Paralel di Kab. Pacitan (41,6 Km)



- ❑ Ruas jalan 049, 049.11K, 049.12K dan pengurangan panjang ruas 048.11K sepanjang 0,20 Km merupakan ruas jalan nasional yang paralel dengan ruas 050.
- ❑ Untuk itu perlu memilih ruas jalan yang optimal sehingga diusulkan memilih ruas 050, sedangkan ruas jalan 049, 049.11K, 049.12K, dan pengurangan panjang ruas 048.11K sepanjang 0,20 Km dan pengurangan panjang ruas 049 diusulkan untuk alih fungsi dan turun statusnya serta diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan, **sedangkan ruas jalan lingkar Pacitan akan diupgrade statusnya menjadi jalan nasional sepanjang 4,36 Km.**

8. Jalan Nasional Paralel di Kota Pandaan (2,15 Km)

JAP
Usulan Jalan Downgrade

- ❑ Ruas jalan 096 (Pandaan – Purwosari) merupakan ruas jalan nasional melalui kota Pandaan sehingga peranan fungsi jalan arteri primer berubah. Selain itu peningkatan kapasitas jalan pada ruas tersebut sulit dilaksanakan karena tata guna lahan, daerah perkantoran, dan padat pemukiman penduduk.
- ❑ Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruas jalan 096 diusulkan untuk berubah fungsi dan turun statusnya serta diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

ruas jalan downgrade:
2,15 Km

Ruas 096
Kendaraan Berat (smp/hari)
Gol 6 : 2619
Gol 7 : 2135
VCR : 0,588
AADT (smp/hari):29528
Lebar Rata-Rata: 14 m

Administrasi

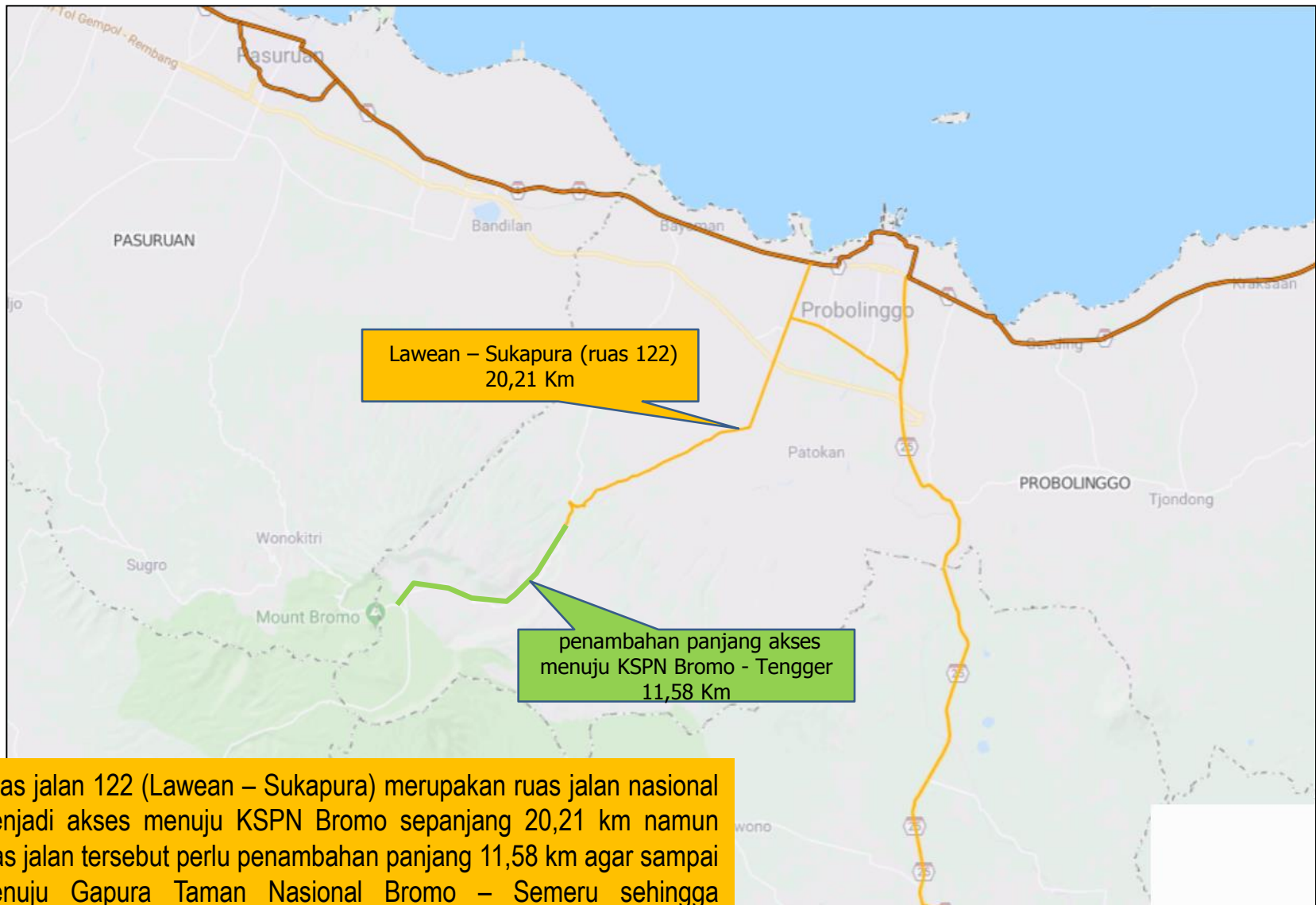
Kabupaten/Kot:
TIMUR

7° 39' 3" S 112° 4

9. Ruas Jalan Nasional Srono – Muncar (10 Km)



Akses KSPN Bromo Tengger (11,58 km)



Ruas jalan 122 (Lawean – Sukapura) merupakan ruas jalan nasional menjadi akses menuju KSPN Bromo sepanjang 20,21 km namun ruas jalan tersebut perlu penambahan panjang 11,58 km agar sampai menuju Gapura Taman Nasional Bromo – Semeru sehingga diusulkan **penambahan panjang 11,58 km (2L; 4m) untuk akses menuju KSPN Bromo – Tengger – Semeru.**

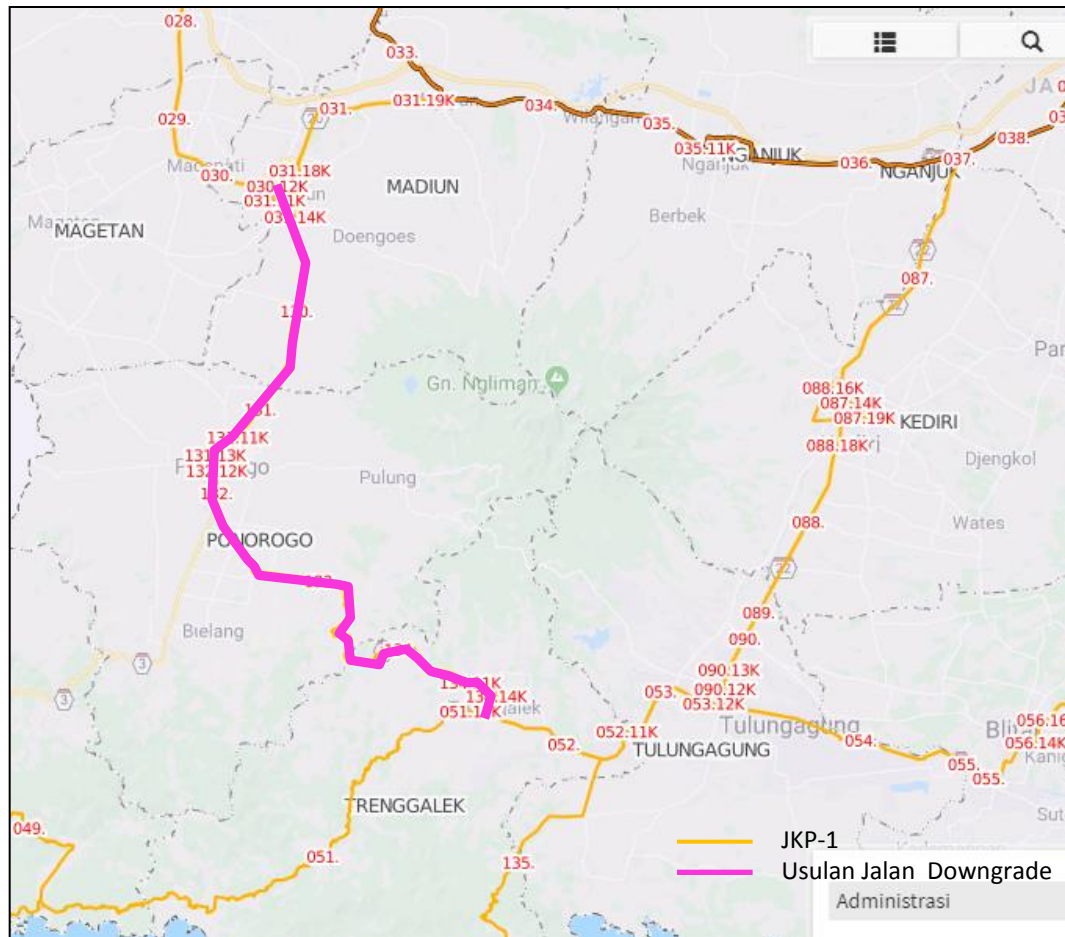


c. JALAN NASIONAL YANG BARU UPGRADE TAHUN 2015





Madiun – Dengok – Trenggalek (79,11 Km)



Ruas jalan 130-134.11K merupakan ruas jalan nasional baru naik status tahun 2015 yang tidak menghubungkan terhadap pusat kegiatan berskala nasional sehingga ruas-ruas jalan diusulkan untuk berubah fungsi dan turun statusnya serta diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

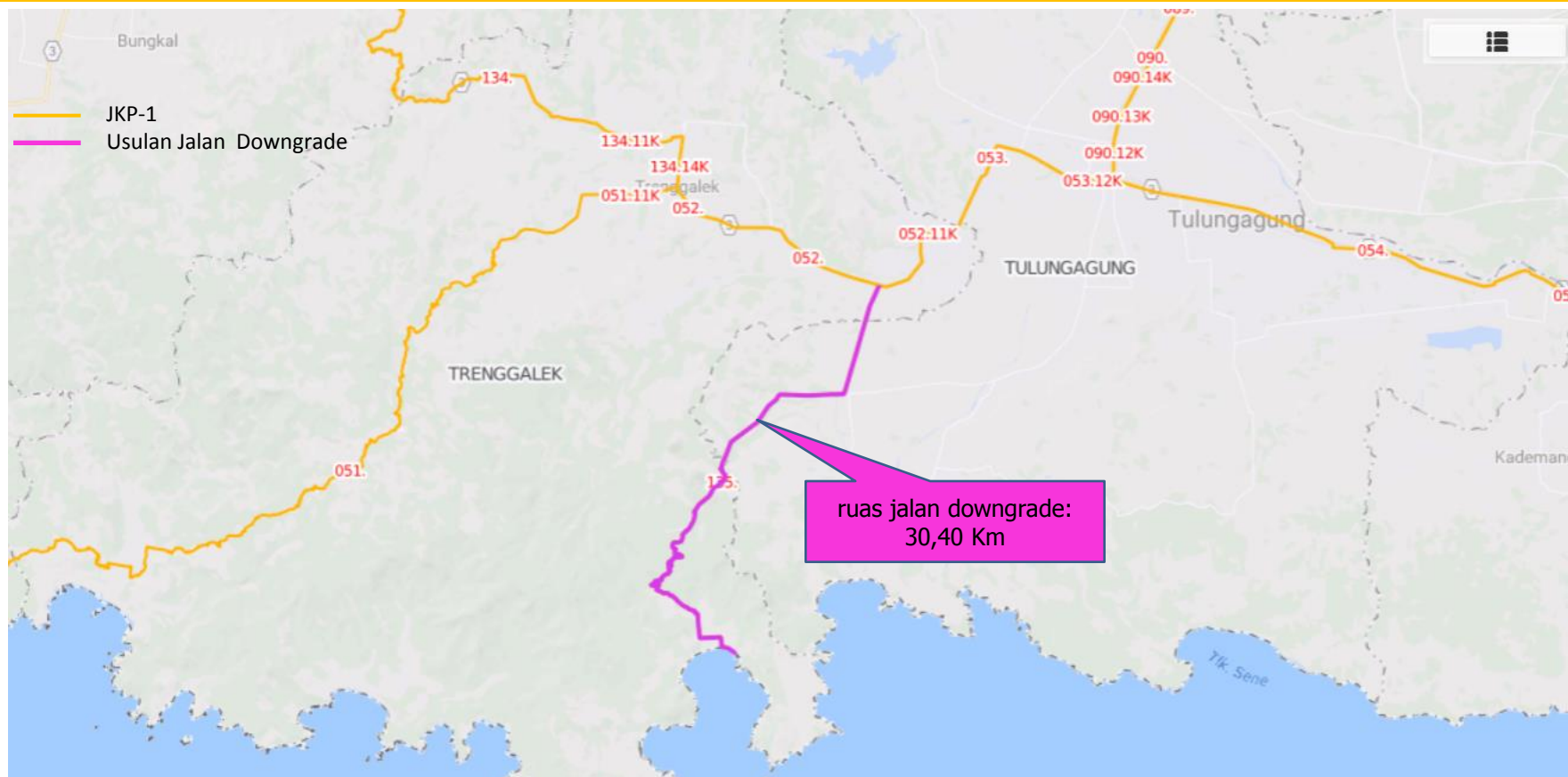
130	Bts Kota Madiun - Bts Kab Ponorogo	15,56 km
130.11K	Jl. Raya Madiun – Ponorogo (Madiun)	0,58 km
131	Bts Kab Madiun – Bts Kota Ponorogo	5,23 km
131.11K	Jl. Arif Rachman Hakim (Ponorogo)	1,73 km
131.12K	Jl. Letjen S. Parman (Ponorogo)	1,80 km
131.13K	Jl. MT Haryono (Ponorogo)	1,66 km
132	Bts Kota Ponorogo – Dengok	2,86 km
132.11K	Jl. Diponegoro (Ponorogo)	0,57 km
132.12K	Jl. Alun-Alun Barat (Ponorogo)	0,21 km
132.13K	Jl. Gatot Subroto (Ponorogo)	0,63 km
133	Dengok – Bts Kab Trenggalek	28,07 km
134	Bts. Kab Ponorogo – Bts Kota Trenggalek	12,95 km
134.11K	Jl. Mayjen Sungkono(Trenggalek)	4,06 km
134.12K	Jl. Yos Sudarso (Trenggalek)	0,70 km
134.13K	Jl. P Sudirman (Trenggalek)	0,54 km
134.14K	Jl. Sukarno Hatta (Trenggalek)	1,96 km
		79,11 Km

Ruas Jalan Nasional Talok Druju – Sendang Biru (41,98 Km)





Jalan Nasional Durenan – Prigi (30,40 Km)



Ruas jalan 135 (Durenan – Prigi) merupakan ruas jalan nasional yang tidak menghubungkan terhadap pusat kegiatan berskala nasional sehingga ruas jalan 135 diusulkan untuk berubah fungsi dan turun statusnya serta diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek.